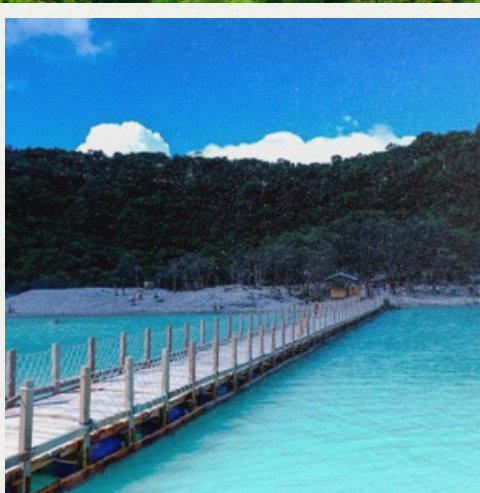


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

L K I P Tahun 2025



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA



BANDUNG
LEBIH BEDAS!

DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Dokumen ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik.

LKIP Tahun 2025 menyajikan gambaran capaian kinerja Dinas Pendidikan yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif dengan sebagian besar indikator melampaui target, sejalan dengan tingkat penyerapan anggaran yang optimal. Hal ini mencerminkan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dalam mendukung peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan daerah.

Namun demikian, dokumen ini juga memuat berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk dinamika kebijakan fiskal daerah, kebutuhan penataan sumber daya manusia pendidikan, serta upaya pemerataan mutu layanan pendidikan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan pijakan dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan guna mewujudkan pelayanan pendidikan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih memiliki keterbatasan, sehingga masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, para pemangku kepentingan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan Tahun 2025.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, para pemangku kepentingan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan Tahun 2025.

Semoga dokumen ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas serta kinerja penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Soreang, Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Asep Kusumah, S.Sos, M.Si
NIP. 197201051991011003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran 2025

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 menggambarkan capaian kinerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap aspek keuangan dan kinerja menunjukkan adanya hubungan yang selaras antara pengelolaan anggaran dan pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah.

Realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai Rp2.285.178.942.362 atau 95,68% dari total pagu Rp2.388.410.857.721. Tingkat penyerapan yang tinggi dan terkendali tersebut mencerminkan kapasitas manajerial yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan. Capaian ini semakin bermakna karena disertai dengan realisasi indikator kinerja utama yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Beberapa indikator strategis menunjukkan kinerja yang sangat positif. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terealisasi sebesar 9,41 tahun atau 101,84% dari target RPJMD. Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,90 tahun atau 101,10% dari target. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan terealisasi sebesar 76,25, melampaui target 75,80. Selain itu, persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B mencapai 83,25% atau 122,43% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan nyata pada aspek akses, mutu layanan, serta tata kelola pendidikan.

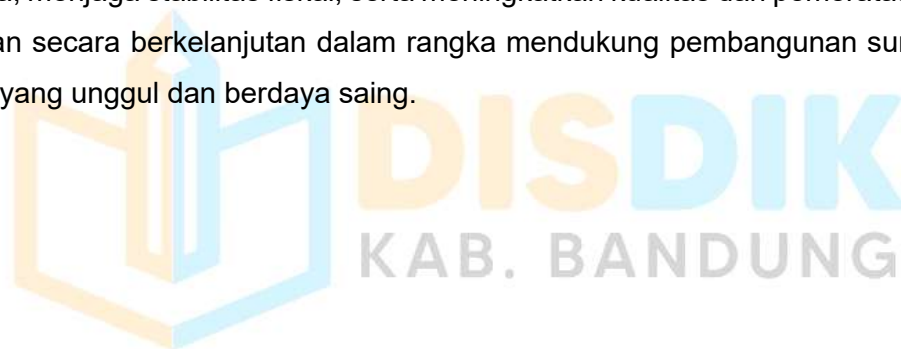
Tingginya capaian indikator kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Perangkat daerah mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal tanpa menghabiskan seluruh pagu anggaran, yang mengindikasikan perencanaan berbasis kinerja berjalan semakin efektif.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan strategis yang memerlukan perhatian berkelanjutan, antara lain kesenjangan mutu antar satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa wilayah, serta belum meratanya distribusi dan kompetensi tenaga pendidik. Tantangan fiskal juga mengemuka pada Tahun 2025, khususnya terkait kebijakan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang

pembiayaannya dibebankan pada APBD di tengah adanya penyesuaian transfer keuangan dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini menuntut perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih cermat serta pengendalian belanja pegawai agar tetap menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif, mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, melakukan penataan kebutuhan dan distribusi tenaga pendidik secara terukur, serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome. Selain itu, inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi pendidik akan terus dikembangkan guna menjawab tantangan perubahan dan meningkatkan daya saing daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dapat dikategorikan sangat baik, efektif, dan efisien. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat untuk memperkuat tata kelola, menjaga stabilitas fiskal, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran umum	1
B. Permasalahan Utama/Isu Strategis	20
C. Dasar Hukum	24
D. Sistem Penyajian	25
BAB II	26
PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis	26
2.1.1 Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2025	26
2.1.2 Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029	28
2.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU) Dinas Pendidikan	30
2.2.1 IKU Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2025	30
2.2.2 IKU Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029	33
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)	35
BAB III	38
AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025	39
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	43
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra dan RPJMD	46
4. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	48
B. Analisis Penyebab Keberhasilan capaian kinerja	49
1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	49
3. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	50
4. Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B	50
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
BAB IV	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	19
Gambar 2. Tren Capaian RLS Kab. Bandung dibandingkan Capaian Prov. Jawa Barat.....	44
Gambar 3. Tren Capaian HLS Kab. Bandung dibandingkan Capaian Prov. Jawa Barat.....	45
Gambar 4. Tren Capaian Index Pendidikan Kab. Bandung dibandingkan Capaian Prov. Jawa Barat	45
Gambar 5. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri.....	54
Gambar 6. Program Pemberdayaan Warga Belajar PKBM	55
Gambar 7. Impelementasi Program PAUD-HI.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan.....	20
Tabel 2. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
Tabel 3. Capaian Minimum Layanan Dasar Pendidikan.....	29
Tabel 4. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 5. Capaian RLS Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat	40
Tabel 6. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2025.....	41
Tabel 7. Capaian Indeks SPM Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2025.....	42
Tabel 8. Realisasi Kinerja Serta Capain Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	43
Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun Ini	46
Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	48
Tabel 11. Kinerja Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran umum

Urusan pendidikan merupakan urusan strategis menyangkut pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan didalam pembangunan dibidang politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya serta bidang-bidang lainnya.

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui program dan kegiatan pada urusan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini perangkat Daerah yang memiliki urusan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kab. Bandung Nomor : 57 tahun 2025, tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Pendidikan memiliki UPTD berupa Satuan Pendidikan Daerah yang terdiri atas Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal, serta memiliki fungsi diantaranya perumusan kebijakan Teknis, sesuai dengan lingkup tugasnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengutip apa yang telah dijelaskan diatas maka Dinas Pendidikan Kab. Bandung yang merupakan unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan Pendidikan memiliki tugas melaporkan serta mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pendidikan yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung.

Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung menyusun LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil – hasil kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada tahun 2025.

Pada tahun 2025 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung melaksanakan 6 Program yang terdiri dari 1 (satu) program pada Belanja SKPD; dan 5 (lima) program urusan pendidikan yang diwujudkan dalam 16 kegiatan yang terdiri dari 98 sub kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 dengan mengacu pada peraturan menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

1. Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung adalah satuan kerja pada pemerintah kabupaten bandung yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dan merupakan salah satu dinas yang berada dilingkungan pemerintah kabupaten bandung dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan bupati bandung nomor 61 tahun 2025 tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan sebagai berikut ;

1.1 Kepala Dinas

a. Tugas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.2 Sekretaris

a. Tugas

Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi: penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

- pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
- penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

1.3 Perencana

a. Tugas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Sekretaris melimpahkan sebagian tugasnya kepada perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.

Dalam hal tidak terdapat perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekretaris dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain perencana dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:

- penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah, rencana strategis Provinsi dan Nasional;
- pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian, Seksi dan Jabatan Fungsional, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Dinas;

- pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Dinas; dan
- penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja (PK), serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan

1.4 Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
- pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian, Seksi, dan jabatan fungsional untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Dinas;
- pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

1.5 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat

a. Tugas

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Sekretaris melimpahkan sebagian tugasnya kepada Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Tugas analisis keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian, Seksi dan Jabatan Fungsional, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;
- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup subbagian Keuangan berdasarkan program kerja Dinas;
- penelitian kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK;
- penyiapan Surat Perintah Membayar; dan
- penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan.

1.6 Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum

a. Tugas

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengembangan Kurikulum;
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengembangan Kurikulum;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum.

1.7 Seksi Sarana dan Prasarana SD

a. Tugas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sarana dan Prasarana.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana dan Prasarana;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana.

1.8 Seksi Pembinaan dan Pengembangan SD

a. Tugas

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengembangan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

1.9 Widyaprada pada Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang melimpahkan sebagian tugasnya kepada widyaprada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat widyaprada, kepala Bidang dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain widyaprada dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud meliputi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengembangan Kurikulum;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pengembangan Kurikulum;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyusunan rencana dan program kerja Pengembangan Kurikulum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

1.10 Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Tugas

Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Fungsi

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1.11 Seksi Sarana dan Prasarana SMP

a. Tugas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sarana dan Prasarana.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana dan Prasarana;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana.

1.12 Seksi Pembinaan dan Pengembangan SMP

a. Tugas

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

1.13 Widyaprada pada Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang melimpahkan sebagian tugasnya kepada widyaprada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat widyaprada, kepala Bidang dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain widyaprada dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud meliputi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengembangan Kurikulum;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pengembangan Kurikulum;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyusunan rencana dan program kerja Pengembangan Kurikulum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

1.14 Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan

a. Tugas

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan.

b. Fungsi

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengendalian Perizinan Pendidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan.

1.15 Seksi Sarana dan Prasarana PAUD

a. Tugas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sarana dan prasarana.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana dan Prasarana;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana.

1.16 Seksi Pembinaan dan Pengembangan PAUD

a. Tugas

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan PAUD mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

1.17 Widyaprada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang melimpahkan sebagian tugasnya kepada widyaprada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat widyaprada, kepala Bidang dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain widyaprada dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud meliputi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengembangan Kurikulum;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pengembangan Kurikulum;

- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyusunan rencana dan program kerja Pengembangan Kurikulum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

1.18 Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

a. Tugas

Kepala Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.

b. Fungsi

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- penyelenggaraan rencana kerja bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra;
- penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.

1.19 Seksi Sarana dan Prasarana PNF

a. Tugas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sarana dan prasarana.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sarana dan Prasarana;

- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sarana dan Prasarana.

1.20 Seksi Pembinaan dan Pengembangan PNF

a. Tugas

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan.

b. Fungsi

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

1.21 Widyaprada pada Bidang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang melimpahkan sebagian tugasnya kepada widyaprada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tidak terdapat widyaprada, kepala Bidang dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain widyaprada dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas PPTK sebagaimana dimaksud meliputi:

- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengembangan Kurikulum;
- penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Pengembangan Kurikulum;
- pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- penyusunan rencana dan program kerja Pengembangan Kurikulum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Dinas dan Daerah.

1.22 UPTD Pendidikan Formal

UPTD Pendidikan Formal terdiri dari:

- a. satuan pendidikan taman kanak-kanak negeri;
- b. satuan pendidikan sekolah dasar negeri; dan
- c. satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri.

UPTD Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala yaitu Guru yang diberi tugas tambahan yang meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, meliputi:
 1. pengkajian kurikulum dan silabus pembelajaran / pembimbingan / program kebutuhan khusus pada satuan Pendidikan;
 2. pengkajian program tahunan dan semester; dan
 3. pembuatan RPP/ pembimbingan sesuai standar proses atau rencana pelaksanaan pembimbingan.
- b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan (pelaksanaan dari RPP)/Rencana Pelaksanaan Layanan (RPP)/ Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).
- c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan (merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan).
- d. membimbing dan melatih peserta didik (kegiatan kokurikuler dan / atau kegiatan ekstrakurikuler).
- e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru, meliputi:
 1. wakil kepala satuan pendidikan.
 2. ketua program keahlian satuan pendidikan.
 3. kepala perpustakaan satuan pendidikan.
 4. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan.
 5. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu.
- f. tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan antara lain:
 1. wali kelas;
 2. pembina osis;
 3. pembina ekstrakurikuler;

4. koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan / penilaian kinerja guru;
 5. guru piket;
 6. penilai kinerja guru;
 7. pengurus organisasi/ asosiasi profesi guru; dan
 8. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- g. Manajerial:
1. merencanakan program sekolah;
 2. mengelola standar nasional pendidikan:
 - a) melaksanakan pengelolaan standar kompetensi lulusan;
 - b) melaksanakan pengelolaan standar isi;
 - c) melaksanakan pengelolaan standar proses;
 - d) melaksanakan pengelolaan penilaian;
 - e) melaksanakan pengelolaan standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
 - f) melaksanakan pengelolaan standar sarana dan prasarana;
 - g) melaksanakan pengelolaan standar pengelolaan; dan
 - h) melaksanakan pengelolaan standar pembiayaan.
 3. melaksanakan pengawasan dan evaluasi.
 4. pengembangan kewirausahaan:
 - a) merencanakan program pengembangan kewirausahaan;
 - b) program pengembangan jiwa kewirausahaan (inovasi, kerja keras, pantang menyerah, dan motivasi untuk sukses);
 - c) melaksanakan program pengembangan jiwa kewirausahaan;
 - d) melaksanakan pengembangan program unit produksi; dan
 - e) melaksanakan program pemagangan.
 - f) Melaksanakan evaluasi program pengembangan kewirausahaan.
- h. supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan:
1. merencanakan program supervisi guru dan tenaga kependidikan;
 2. melaksanakan supervisi guru;
 3. melaksanakan supervisi terhadap tenaga kependidikan;
 4. menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 5. melaksanakan evaluasi supervisi guru dan tenaga kependidikan;
 6. merencanakan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, dan/atau masyarakat; dan
- j. pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan UPTD.

1.23 Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar

Sanggar kegiatan belajar mempunyai tugas memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sanggar kegiatan belajar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada sanggar kegiatan belajar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sanggar kegiatan belajar mempunyai sub tugas meliputi:

- a. membantu Kepala Disdik dalam kebijakan umum pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Disdik di bidang sanggar kegiatan belajar;
- b. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi Disdik di bidang sanggar kegiatan belajar;
- c. menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan sanggar kegiatan belajar;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja pelaksanaan sanggar kegiatan belajar berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan program kerja Disdik serta kondisi dinamis masyarakat di lingkup kerjanya;
- e. pelayanan pendidikan sanggar kegiatan belajar;
- f. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- j. memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- k. mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- m. menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- o. memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.24 Korbidik

Korbidik mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengarahkan dan membuat laporan kegiatan dengan cara penerimaan dan mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan pelayanan UPTD satuan pendidikan taman kanak-kanak, UPTD satuan pendidikan sekolah dasar, dan UPTD satuan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah kerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar, optimal dan tepat sasaran.

Dalam melaksanakan tugas Korbidik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan UPTD satuan pendidikan taman kanak-kanak, UPTD satuan pendidikan sekolah dasar, dan UPTD satuan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah kerjanya;
- b. pengkoordinasian perencanaan pelayanan UPTD satuan pendidikan taman kanak-kanak, UPTD satuan pendidikan sekolah dasar, dan UPTD satuan pendidikan sekolah menengah pertama di wilayah kerjanya; dan

1.25 Jabatan Fungsional

- a. Pengaturan pembentukan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2. Susunan Organisasi dan Personil

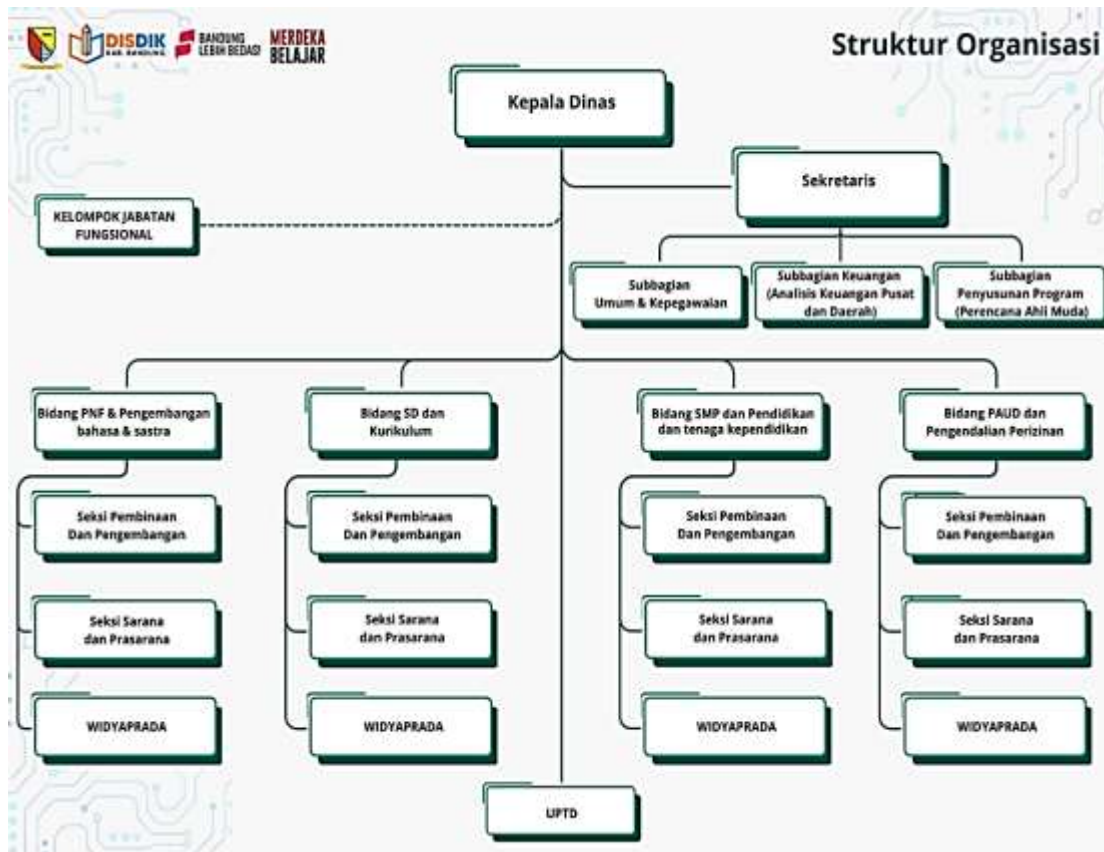
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, meliputi:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran
 - b) Penelaah Teknis Kebijakan;
 - c) Pengolah Data dan Informasi; dan
 - d) Pengadministrasi Perkantoran.
3. Bidang Sekolah Dasar dan Kurikulum, meliputi:
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
 - c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - d) Pengolah Data dan Informasi.
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
 - c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - d) Pengolah Data dan Informasi.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, meliputi:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
 - c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - d) Pengolah Data dan Informasi.
6. Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra, meliputi:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi;
 - Pengadministrasi Perkantoran;
 - Operator Layanan Operasional; dan
 - Pengelola Umum Operasional.
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan, meliputi:
 - Penelaah Teknis Kebijakan;
 - Pengolah Data dan Informasi; dan
 - Pengadministrasi Perkantoran.
 - c) Penelaah Teknis Kebijakan; dan
 - d) Pengolah Data dan Informasi.

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung nomor 61 tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dengan bentuk Struktur Organisasi seperti berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

3. Kondisi Pegawai Disdik Kabupaten Bandung

3.1 Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan

No.	Nama Jabatan	ASN	Non ASN	Jumlah
1	Pejabat Esselon II	1		1
2	Pejabat Esselon III a	1		1
3	Pejabat Esselon III b	4		4
4	Pejabat Esselon IV a	9		9
5	Pengawas TK	23		23
6	Pengawas SD	94		94
7	Pengawas SMP	7		7
8	Pengawas PAI	9		9
9	Penilik 53 orang	53		53
10	Staff	388		388
11	Kepala TK	3		3
12	Kepala Sekolah SD	953		953
13	Kepala Sekolah SMP	75		75
14	Kepala SPNF Sanggar Kegiatan Belajar	1		1
15	Guru TK	109	2.814	2.923
16	Guru SD	11.304	7.512	18.816
17	Guru SMP	3.799	6.010	9.809
18	Pamong Belajar	8		8
	Jumlah Total	16.841	16.336	33.177

B. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, Perangkat Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Pelaksanaan kewenangan tersebut diarahkan untuk menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu layanan, serta tata kelola pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, belum meratanya akses layanan pendidikan yang berkualitas antarwilayah, baik dari sisi keterjangkauan, ketersediaan sarana prasarana, maupun dukungan layanan penunjang lainnya. Kedua, capaian mutu pembelajaran masih relatif rendah, yang tercermin dari hasil pembelajaran peserta didik dan belum optimalnya implementasi standar proses pembelajaran. Ketiga, belum meratanya distribusi dan kualitas guru, termasuk ketimpangan kualifikasi dan kompetensi pendidik antarwilayah. Permasalahan merupakan suatu kondisi

atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada. Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya.

Perkembangan isu dan tren global saat ini menimbulkan tantangan yang semakin kompleks bagi pembangunan pendidikan nasional dan daerah. Globalisasi yang ditandai dengan semakin intensifnya interaksi antarbangsa telah menembus batas-batas negara, sehingga menuntut sistem pendidikan untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya berdaya saing secara global, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan universal dan kewarganegaraan global. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya internalisasi nilai global citizenship, toleransi, dan solidaritas kemanusiaan dalam proses pembelajaran di berbagai satuan pendidikan.

Tren urbanisasi global dan dinamika demografi juga berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang relatif besar memiliki potensi bonus demografi sebagai kekuatan ekonomi di masa depan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta ketimpangan ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang berkualitas, serta potensi bonus demografi belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi potensi sumber daya manusia sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital berpotensi mempercepat pencapaian target pendidikan, memperluas akses layanan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mempercepat distribusi pengetahuan. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan seperti kesenjangan akses teknologi (digital divide), rendahnya literasi digital, risiko kecanduan internet, penyebaran informasi palsu (hoaks), serta meningkatnya kasus cybercrime dan cyberbullying di lingkungan peserta didik yang memerlukan perhatian serius dari sistem pendidikan.

Perubahan lanskap dunia kerja akibat kemajuan teknologi juga menjadi tantangan besar bagi pendidikan. Otomatisasi dan penggunaan mesin telah menyebabkan berkurangnya kebutuhan terhadap tenaga kerja pada jenis pekerjaan tertentu, khususnya pekerjaan berkeahlian dasar, sementara kebutuhan tenaga kerja baru justru meningkat pada sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, dan industri ritel. Permasalahan yang muncul adalah masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga pendidikan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan keterampilan abad ke-21.

Selain itu, dunia juga menghadapi tiga krisis global, yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta penurunan keanekaragaman hayati. Ketiga krisis tersebut diproyeksikan akan terus berlangsung dan berdampak luas terhadap kehidupan manusia. Permasalahan pendidikan yang muncul adalah belum optimalnya pendidikan lingkungan dan pendidikan perubahan iklim dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku berkelanjutan pada peserta didik. Padahal pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang peduli lingkungan, tangguh terhadap bencana, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

Pembangunan pendidikan di tingkat nasional hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan saling terkait. Meskipun akses pendidikan telah mengalami peningkatan secara signifikan, namun pemerataan dan mutu layanan pendidikan antarwilayah masih belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta antara satuan pendidikan negeri dan swasta masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan.

Dari sisi mutu, capaian hasil belajar peserta didik secara nasional masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar global. Hal ini tercermin dari hasil berbagai asesmen nasional dan internasional yang menunjukkan bahwa kompetensi literasi membaca, numerasi, dan sains peserta didik Indonesia masih perlu ditingkatkan secara serius. Selain itu, penerapan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, kompetensi abad 21, dan pemanfaatan teknologi digital belum sepenuhnya merata di seluruh satuan pendidikan.

Permasalahan lain yang masih menonjol adalah keterbatasan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Distribusi guru yang belum proporsional, ketidaksesuaian kualifikasi dengan mata pelajaran yang diampu, serta masih terbatasnya kompetensi pedagogik dan profesional guru di beberapa daerah menjadi faktor penghambat dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sisi lain, kesejahteraan dan motivasi kerja pendidik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga masih memerlukan perhatian khusus.

Dari aspek sarana dan prasarana, masih terdapat satuan pendidikan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, baik dari kondisi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, maupun akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Keterbatasan infrastruktur pendidikan ini berdampak langsung terhadap efektivitas proses pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik.

Selain itu, tata kelola dan pembiayaan pendidikan di tingkat nasional juga masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dalam hal efektivitas pemanfaatan anggaran, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Transformasi kebijakan pendidikan juga memerlukan kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan budaya organisasi agar dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh daerah.

Dengan demikian, permasalahan pendidikan di tingkat nasional tidak hanya mencakup aspek akses, mutu, dan relevansi, tetapi juga menyangkut pemerataan, tata kelola, serta

kesiapan sistem pendidikan dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai permasalahan strategis yang memerlukan penanganan terpadu dan berkelanjutan. Dari sisi pemerataan akses, masih terdapat kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah, khususnya di wilayah perdesaan, pegunungan, dan kawasan dengan tingkat sosial ekonomi rendah, yang ditandai dengan masih ditemukannya anak tidak sekolah, angka putus sekolah, serta keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Dari aspek mutu, capaian kompetensi peserta didik belum merata antar satuan pendidikan, yang dipengaruhi oleh variasi kualitas pembelajaran, keterbatasan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi pembelajaran. Selain itu, distribusi guru belum sepenuhnya proporsional baik dari sisi jumlah, kualifikasi, maupun bidang keahlian. Sementara itu, dari aspek tata kelola, masih terdapat tantangan dalam perencanaan berbasis data, sinkronisasi program antar pemangku kepentingan, efektivitas penganggaran, serta pengawasan mutu layanan pendidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut secara keseluruhan berdampak pada belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang perlu segera di atasi guna mendukung terwujudnya visi “Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan.”

Permasalahan tersebut selaras dengan isu strategis yang teridentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu belum optimalnya pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat daya saing daerah.

Selain itu, dinamika lingkungan strategis juga turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan. Pada tingkat global, arus globalisasi yang semakin intensif, perubahan demografi penduduk dunia, perkembangan teknologi yang pesat, serta isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menuntut sistem pendidikan yang adaptif dan responsif. Pada tingkat nasional, isu kesenjangan akses dan mutu layanan pendidikan antarwilayah, mutu hasil pembelajaran, ketimpangan distribusi dan kualifikasi guru, serta keterbatasan sarana prasarana dan akses teknologi informasi menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Sementara pada tingkat regional, masih terdapat ketimpangan pemerataan akses layanan pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana antarwilayah, serta distribusi guru yang belum proporsional.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisis lingkungan strategis tersebut, ditetapkan beberapa isu strategis Perangkat Daerah, yaitu:

1. Pemerataan akses pendidikan;
2. Peningkatan capaian mutu pembelajaran; dan

3. Penguatan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan.

Isu-isu strategis tersebut menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja dan target capaian dalam dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, termasuk dalam LKIP ini.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2022 mengacu pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1968. Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor NOMOR 8 TAHUN 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

D. Sistem Penyajian

Adapun sistem Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdik Kabupaten Bandung Tahun 2023 menurut Permenpan 53/2014 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menjelaskan bagaimana perangkat daerah menjalankan tugas untuk mencapai target baik kendala maupun faktor pendorong secara umum dan singkat (capaian target kinerja dan capaian target anggaran secara total)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah
- C. Dasar Hukum
- D. Sistem Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan RPJMD 2025 - 2029, dengan ini terdapat beberapa penyesuaian yang harus diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. diantaranya rencana strategis yang digunakan meliputi dua dokumen perencanaan strategis yaitu renstra 2021-2024 untuk penyusunan Perjajian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2025 dan renstra 2025 - 2029 untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

2.1.1 Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2025

Renstra Dinas Pendidikan pada tahun 2025 berdasarkan penetapan renstra dengan nomor : 101 tahun 2022 tentang rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2025. Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan nilai-nilai daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang pada masa kepemimpinan tahun 2016-2021, visi yang dikedepankan adalah:

” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera”

Berdasarkan visi pembangunan tersebut, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi Pembangunan akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Misi pembangunan Jangka menengah daerah kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2025 yang berkaitan dengan layanan pendidikan yaitu misi ke 2 menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata.

Tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada sektor pendidikan yang tertuang dalam renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi Kabupaten Bandung. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara

lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung periode tahun 2021-2026 yang sesuai dengan rumusan visi dan misi Kabupaten Bandung adalah:

“Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Merata dan berkualitas”

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan. Dan rumusan sasaran sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2021-2026 adalah:

- 1. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas
- 2. Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi dan layanan Pendidikan

TUJUAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 2. Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SEBELUM	INDIKATOR SESUDAH
1	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas		Rata Rata Lama Sekolah	Rata Rata Lama Sekolah
2		Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas	capaian SPM Pendidikan	
				Index SPM Pendidikan
3		Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel dalam	skor pemetaan mutu	

		rangka optimalisasi fungsi dan layanan pendidikan		
				presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B

2.1.2 Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029

Renstra Dinas Pendidikan pada tahun 2025 - 2029 berdasarkan penetapan renstra dengan nomor : tahun 2025. Renstra Disdik tahun 2025 - 2029 disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh potensi kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Bandung baik sektoral maupun lintas sektor berkenaan dengan fungsi fungsi pendidikan.

Berdasarkan penelahaan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025 - 2029 , dengan mempertimbangkan visi bupati Bandung yaitu Terwujudnya Kabupaten Bandung lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut Adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah dirumuskan, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi Pembangunan akan menjadi acuan dalam

pembuatan program serta kegiatan 5 (lima) tahun ke depan. Berikut misi pembangunan Jangka menengah daerah kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.

Misi ke 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak. Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius.

Tujuan Renstra dimaksudkan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD. Sasaran dalam RPJMD merupakan target-target pembangunan jangka menengah yang harus dicapai oleh daerah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Sasaran ini menggambarkan capaian hasil yang konkret dan terukur dalam kurun waktu lima tahun dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah, sasaran RPJMD dijadikan acuan langsung untuk dirumuskan kembali menjadi tujuan Renstra yang lebih spesifik dan operasional. Berdasarkan pemaparan dari isu strategis yang ada di bab sebelumnya, serta sasaran RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan maka disusun Tujuan Renstra Dinas Pendidikan yang disusun secara spesifik untuk menjawab dan mengatasi isu strategis tersebut guna mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan yaitu :

“Meningkatkan akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat”

Sasaran strategis dalam Renstra Dinas Pendidikan disusun untuk menjawab isu-isu strategis dan permasalahan nyata di sektor pendidikan yang juga menjadi perhatian dalam RPJMD. di dokumen RPJMD menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sasaran Renstra Dinas Pendidikan fokus pada peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan peningkatan fasilitas pendidikan. sehingga dirumuskan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029 adalah :

- 1. **Meningkat nya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan**
- 2. **Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan**
- 3. **Meningkatnya capaian minimum layanan dasar pendidikan**

Tabel 3. Capaian Minimum Layanan Dasar Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat		Rata Rata Lama Sekolah (RLS)

Tujuan	Sasaran	Indikator
(2)	(3)	(4)
		Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Meningkatnya capaian minimum layanan dasar pendidikan	Indeks SPM Pendidikan
	Meningkatnya pemerataan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
	Meningkatnya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)

2.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU) Dinas Pendidikan

2.2.1 IKU Dinas Pendidikan Tahun 2021 - 2025

IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan nomor SK : 421/023.1- Disdik 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2025. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021–2025, Dinas Pendidikan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud meliputi:

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian peningkatan akses dan partisipasi penduduk dalam pendidikan formal. Indikator ini menggambarkan keberhasilan Dinas Pendidikan dalam mendorong pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan serta menurunkan angka putus sekolah.

2. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Indeks SPM Pendidikan merupakan indikator yang mengukur tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian indikator ini mencerminkan kualitas layanan pendidikan dasar yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta tingkat kepatuhan terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

3. Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B

Persentase sekolah berakreditasi minimal B merupakan indikator yang menggambarkan tingkat mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Indikator ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas tata kelola, sarana prasarana, serta proses pembelajaran pada satuan pendidikan.

Indikator Kinerja Utama tersebut digunakan sebagai alat ukur kinerja Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai dasar evaluasi pencapaian sasaran strategis dalam LKjIP.

Berikut IKU Dinas Pendidikan berdasarkan renstra revisi 2021-2025 :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang KM. 17 –Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp. 022-5897517
Fax. 022-5897518 Kode Pos 40512

**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 421/0063.1 - Disdik/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021-2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung periode 2021-2025, yaitu "Kabupaten Bandung yang bedas, maju, dan berkelanjutan (BEDAS)", diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas;
- b. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan jangka menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2021 -2025;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : | Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini.; |
| KEDUA | : | IKU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan.; |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : Januari 2024

a.n Bupati Bandung
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 1989021001

- Tembusan :
- Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
 - Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
 - Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 421/0063.1 - Disdik/2024
TANGGAL : Januari 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2021-2025

NO	MISI	TUJUAN	IKU	ALASAN/ SUMBERDATA
1	Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Merata dan berkualitas	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	Capaian peningkatan akses dan partisipasi penduduk dalam pendidikan / BPS
			Indeks SPM Pendidikan	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ RAPOR PENDIDIKAN KEMENDIKDASMEN
			presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	Tingkat mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil akreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang/ RAPOR PENDIDIKAN KEMENDIKDASMEN

Soreang, januari 2024

a.n Bupati Bandung
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 1989021001

2.2.2 IKU Dinas Pendidikan Tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yaitu “Kabupaten Bandung lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas”. Penetapan IKU ini menjadi landasan utama dalam penyusunan perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan.

Sejalan dengan misi pembangunan daerah, khususnya misi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif, dan berakhlak, Dinas Pendidikan menetapkan tujuan strategis berupa peningkatan akses dan mutu pendidikan serta penguatan kompetensi dasar masyarakat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pengukuran kinerja yang terfokus pada indikator-indikator strategis yang relevan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam periode 2025–2029, Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung difokuskan pada peningkatan capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Rata-Rata Lama Sekolah digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, yang mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses dan partisipasi pendidikan. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah menggambarkan peluang pendidikan yang dapat diakses oleh anak usia sekolah di masa mendatang, dengan asumsi pola partisipasi sekolah yang berlaku saat ini.

Pemilihan RLS dan HLS sebagai IKU didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua indikator tersebut merupakan indikator makro pendidikan yang telah digunakan secara nasional dan memiliki keterbandingan antarwilayah. Selain itu, data RLS dan HLS bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan pendidikan daerah.

Capaian IKU tersebut akan dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, antara lain peningkatan akses layanan pendidikan dasar dan menengah, penurunan angka anak tidak sekolah dan putus sekolah, peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan, serta penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh perangkat organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan berkewajiban untuk mendukung pencapaian IKU melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis.

Penjabaran IKU ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, dan dokumen penganggaran, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung setiap tahunnya. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan

pembangunan bidang pendidikan dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bandung.

IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan nomor SK : 421/3766 - Disdik 2025 tanggal September 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Korprikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Telpun 022-5807317 Kode Pos 40112
Laman: <http://iduk.kabupatenbandung.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 421 / 3766 - Disdik 2025
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- Bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung periode 2025-2029, yaitu "Kabupaten Bandung lebih bebas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas", diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas;
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung;
- Bahwa perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan jangka menengah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2891);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini;

KEDUA

IKU sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Pelaporan Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Rajy Kukuhah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199110 1 003

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan;
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 421 / 3766 Disdik 2025
TANGGAL : September 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya perluasan akses dan pendidikan yang merata	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,23	9,41	9,52	9,63	9,74	9,85
2		Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,76	12,83	12,89	12,96	13,02	13,09

34

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengalami perubahan yang signifikan. Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra Dinas Pendidikan dan RPJMD 2025 - 2029, dengan ini terdapat beberapa penyesuaian yang harus diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. diantaranya rencana strategis yang digunakan meliputi dua dokumen perencanaan strategis yaitu renstra 2021-2024 untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Anggaran Murni Tahun 2025 dan renstra 2025 - 2029 untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja dalam LKIP yang penyusunannya berdasarkan Renstra 2021 - 2024.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen antara Kepala Dinas Pendidikan dengan Bupati Bandung untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja Dinas Pendidikan selama Tahun 2025. Perjanjian kinerja untuk Anggaran perubahan 2025 disusun berdasarkan renstra 2025 - 2029.

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Pendidikan menetapkan tiga sasaran strategis utama. Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya akses, mutu pendidikan, dan kompetensi dasar masyarakat. Sasaran ini diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan target 13,02 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan target 9,74 tahun, serta Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dengan target 79,00 poin. Pencapaian sasaran ini diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai standar yang telah ditetapkan. Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran ini difokuskan pada penguatan tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah dengan target 56,00 poin dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target 66,00 poin. Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui penguatan sistem manajemen kinerja, pengendalian risiko, serta peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut, Dinas Pendidikan melaksanakan sejumlah program yang didanai melalui APBD Perubahan Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp2.386.726.514.721,00. Program dimaksud meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, serta Program

Pengembangan Bahasa dan Sastra. Seluruh program dan anggaran tersebut diarahkan secara langsung untuk mendukung pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Selain itu, Dinas Pendidikan berkomitmen untuk menghasilkan minimal satu inovasi baru sebagai kontribusi terhadap peningkatan Indeks Inovasi Daerah serta percepatan pencapaian program strategis Kepala Daerah. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan menjadi dasar evaluasi kinerja oleh Kepala Daerah.



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP KUSUMAH,S.SOS, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si
Jabatan : BUPATI BANDUNG
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 25 September 2025

PIHAK KEDUA



Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si



ASEP KUSUMAH

PIHAK PERTAMA



ASEP KUSUMAH,S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197201051091011003

Salinan ini diiklankan secara resmi melalui aplikasi e-Signature <https://eikabang.bandung.go.id> dan dapat di cek melalui aplikasi e-Signature ini.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
i.	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	• RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	• 923 Tahun
1	Meningkatnya Perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas	• capaian SPM Pendidikan Kabupaten	• 75.88 %
2	Meningkatnya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	• 12.83 %
ii.	Meningkatnya kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	• Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	• 75.80 %
3	meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan	• nilai AKOP • nilai BMD	• 82.00 Poin • 94.00 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.469.226.527.896.00	APBD-P
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	916.494.560.975.00	APBD-P
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0.00	APBD-P
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0.00	APBD-P
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	600.000.000.00	APBD-P
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	405.425.850.00	APBD-P
TOTAL		2.386.726.514.721.00	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

BUPATI BANDUNG,



Dr. H. M. GADANG S. SUPRIATNA, S.Sc., M.Si

Soreang, 25 September 2025

SEKRETARIS PERTAMA,

ASEP KUSUMAH S.SOS., M.Si
Pembinia Utama Muda
NIP. 1972010511991011003

Informasi lebih lanjut mengenai informasi ini dapat diakses melalui alamat: <https://pjdikab.bandungkab.go.id> dan dapat diakses melalui aplikasi aplikasi lainnya.

KAB. BANDUNG

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung pada periode pelaporan merupakan hasil implementasi kebijakan dan program yang disusun secara konsisten dengan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung. Pada periode sebelumnya, Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 diarahkan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS)” melalui tujuan strategis meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Sasaran yang ditetapkan difokuskan pada perluasan akses dan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta penguatan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Seiring dengan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan melakukan penyesuaian perencanaan strategis guna mendukung visi pembangunan “Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas.” Dalam konteks tersebut, Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses, mutu, dan layanan dasar pendidikan sebagai kontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan daya saing masyarakat. Tujuan Renstra dirumuskan secara lebih operasional, yaitu meningkatkan akses mutu pendidikan dan kompetensi dasar masyarakat, dengan sasaran strategis meliputi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, serta pencapaian standar minimum layanan dasar pendidikan.

Berdasarkan kedua arah perencanaan strategis tersebut, capaian kinerja Dinas Pendidikan dalam LKIP ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Kinerja organisasi secara umum telah berkontribusi positif terhadap peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta perbaikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Capaian tersebut menjadi landasan penting bagi Dinas Pendidikan untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 4. Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target Murni 2025	Target Perubahan 2025	Realisasi 2025	Capain Realisasi thd target murni	Capain Realisasi thd target perubahan
1	Rata – rata Lama Sekolah	9,18	9,23	9,4	102,40 %	101,84 %
No	Indikator Kinerja	Target Murni 2025	Target Perubahan 2025	Realisasi 2025	Capain Realisasi thd target murni	Capain Realisasi thd target perubahan
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	N/A	12,83	12,90	N/A	100,55 %
3	Indeks SPM Pendidikan	64	75,80	76,25	119,14 %	100,59 %
4	Presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	68 %	N/A	83,25 %	122,43 %	N/A

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten dengan sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas serta Renstra Dinas Pendidikan. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator outcome utama bidang pendidikan, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terealisasi sebesar 9,4 tahun, mencapai 97,92% terhadap target murni dan melampaui target perubahan dengan capaian 101,84%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program pemerataan akses pendidikan dan keberlanjutan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berdampak pada meningkatnya partisipasi penduduk dalam pendidikan formal. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target murni, realisasi RLS telah melampaui target perubahan yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan kebijakan pendidikan tahun berjalan.

Tabel 5. Capaian RLS Kab/Kota Di Provinsi Jawa Barat

No	Wilayah	2025	No	Wilayah	2025
1	Kota Bekasi	12.11	16	Kabupaten Karawang	8.31
2	Kota Depok	11.83	17	Kabupaten Ciamis	8.23
3	Kota Cimahi	11.53	18	Kabupaten Pangandaran	8.11
4	Kota Bandung	11.41	19	Kabupaten Tasikmalaya	7.98
5	Kota Bogor	10.72	20	Kabupaten Kuningan	7.91
6	Kota Cirebon	10.54	21	Kabupaten Cirebon	7.88
7	Kota Sukabumi	10.39	22	Kabupaten Garut	7.86
8	Kabupaten Bekasi	10.07	23	Kabupaten Majalengka	7.81
9	Kota Tasikmalaya	9.64	24	Kabupaten Subang	7.68
10	Kabupaten Bandung	9.4	25	Kabupaten Indramayu	7.06
11	Kabupaten Sumedang	8.92	26	Kabupaten Sukabumi	7.63
12	Kota Banjar	8.84	27	Kabupaten Cianjur	7.62
13	Kabupaten Bogor	8.72		Provinsi Jawa Barat	9.14
14	Kabupaten Purwakarta	8.37	sumber data : statistik.jabarprov.go.id		
15	Kabupaten Bandung Bara	8.34			

Berdasarkan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Kabupaten Bandung mencatat capaian sebesar **9,40 tahun**, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar **9,14 tahun**. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bandung pada **peringkat ke-10 dari 27 kabupaten/kota**, yang menunjukkan posisi relatif kompetitif pada kelompok capaian menengah. Jika dibandingkan khusus antar kabupaten di Provinsi Jawa Barat, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bandung sebesar **9,40 tahun** menempatkan Kabupaten Bandung pada **peringkat ke-2 dari 18 kabupaten**. Posisi tertinggi ditempati Kabupaten Bekasi (10,07 tahun), diikuti Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Sumedang (8,92 tahun), Kabupaten Bogor (8,72 tahun), dan Kabupaten Purwakarta (8,37 tahun).

Peringkat tersebut menunjukkan bahwa capaian keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Bandung termasuk **sangat baik dan berada pada kelompok kabupaten dengan kinerja tertinggi**, serta menjadi salah satu daerah rujukan dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan. Meskipun demikian, peningkatan keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas tetap menjadi prioritas, agar keunggulan posisi Kabupaten Bandung dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Secara substantif, nilai RLS 9,40 tahun menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bandung telah menempuh pendidikan hingga akhir jenjang pendidikan menengah pertama dan mulai memasuki jenjang pendidikan menengah atas. Posisi yang berada di atas rata-rata provinsi menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan dasar telah berjalan cukup baik. Namun demikian, jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang telah melampaui 11 tahun, masih terdapat ruang perbaikan khususnya dalam mendorong keberlanjutan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah atas.

Capaian ini menjadi dasar dalam penguatan kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, terutama melalui peningkatan partisipasi pendidikan menengah, penurunan angka putus sekolah, penguatan program wajib belajar, serta intervensi afirmatif bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan upaya yang terarah dan berkelanjutan, peningkatan

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung diharapkan terus mengalami perbaikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) terealisasi sebesar 12,90 tahun, melampaui target murni (101,10%) maupun target perubahan (100,55%). Capaian ini mencerminkan meningkatnya peluang generasi usia sekolah untuk menempuh pendidikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sebagai dampak dari program peningkatan mutu layanan pendidikan, dukungan operasional satuan pendidikan, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Kabupaten Bandung.

Tabel 6. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2025.

No	Wilayah	2025			
1	Kabupaten Bogor	12.76	16	Kabupaten Bekasi	13.22
2	Kabupaten Sukabumi	12.4	17	Kabupaten Bandung Barat	12.26
3	Kabupaten Cianjur	12.31	18	Kabupaten Pangandaran	12.41
4	Kabupaten Bandung	12.99	19	Kota Bogor	13.69
5	Kabupaten Garut	12.43	20	Kota Sukabumi	13.63
6	Kabupaten Tasikmalaya	12.92	21	Kota Bandung	14.27
7	Kabupaten Ciamis	14.31	22	Kota Cirebon	13.45
8	Kabupaten Kuningan	12.52	23	Kota Bekasi	14.15
9	Kabupaten Cirebon	12.67	24	Kota Depok	14.21
10	Kabupaten Majalengka	12.5	25	Kota Cimahi	13.86
11	Kabupaten Sumedang	13.21	26	Kota Tasikmalaya	13.51
12	Kabupaten Indramayu	12.58	27	Kota Banjar	13.29
13	Kabupaten Subang	12.38	28	Provinsi Jawa Barat	13.02
14	Kabupaten Purwakarta	12.51			
15	Kabupaten Karawang	12.22			

Berdasarkan tabel capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2025, Kabupaten Bandung mencatat nilai sebesar 12,99 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk di Kabupaten Bandung memiliki harapan lama sekolah hampir 13 tahun, atau setara dengan jenjang pendidikan hingga kelas XII (SMA/ sederajat). Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat sebesar 13,02, capaian Kabupaten Bandung berada sedikit di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sekitar 0,03 poin. Namun demikian, posisinya masih tergolong kompetitif di antara kabupaten lain di Jawa Barat dan berada dalam kelompok nilai menengah-atas. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, HLS Kabupaten Bandung: Lebih tinggi dari Kabupaten Bogor (12,76), Garut (12,43), dan Cianjur (12,31). Sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Tasikmalaya (12,92). Masih di bawah Kabupaten Ciamis (14,31) yang menjadi capaian tertinggi pada kelompok kabupaten. Secara substantif, angka 12,99 tahun menunjukkan bahwa akses dan partisipasi pendidikan di Kabupaten Bandung relatif baik dan telah mendekati rata-rata provinsi. Namun, masih terdapat ruang peningkatan agar dapat melampaui rata-rata provinsi dan mendekati capaian daerah dengan HLS tertinggi di Jawa Barat.

Pada indikator Indeks SPM Pendidikan, realisasi sebesar 76,25 telah melampaui target perubahan dengan capaian 100,59%. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai standar nasional, khususnya dalam aspek ketersediaan

layanan, kualitas proses pembelajaran, serta dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Capaian ini secara langsung mendukung IKU Kepala Dinas yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 7. Capaian Indeks SPM Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2025

No	Wilayah	2025	Kategori Tuntas
1	Kabupaten Bogor	72,79	Pratama
2	Kabupaten Sukabumi	73,46	Pratama
3	Kabupaten Cianjur	70,84	Pratama
4	Kabupaten Bandung	76,25	Pratama
5	Kabupaten Garut	73,53	Pratama
6	Kabupaten Tasikmalaya	78	Pratama
7	Kabupaten Ciamis	80,73	Madya
8	Kabupaten Kuningan	81,18	Madya
9	Kabupaten Cirebon	75,37	Pratama
10	Kabupaten Majalengka	74,4	Pratama
11	Kabupaten Sumedang	78,79	Pratama
12	Kabupaten Indramayu	65,26	Muda
13	Kabupaten Subang	74,18	Pratama
14	Kabupaten Purwakarta	72,29	Pratama
15	Kabupaten Karawang	71,78	Pratama
16	Kabupaten Bekasi	82,53	Madya
17	Kabupaten Bandung Bara	75,54	Pratama
18	Kabupaten Pangandaran	78,84	Pratama
19	Kota Bogor	79,81	Pratama
20	Kota Sukabumi	80,64	Madya
21	Kota Bandung	81,34	Madya
22	Kota Cirebon	75,37	Pratama
23	Kota Bekasi	82,53	Madya
24	Kota Depok	80,54	Madya
25	Kota Cimahi	81,84	Madya
26	Kota Tasikmalaya	80,03	Madya
27	Kota Banjar	81,71	Madya
28	Provinsi Jawa Barat	73,43	Pratama

Berdasarkan data capaian tahun 2025, Kabupaten Bandung memperoleh nilai sebesar 76,25 dengan kategori Pratama. Capaian ini berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 73,43, sehingga menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan agregat provinsi.

Dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, posisi Kabupaten Bandung berada pada kelompok menengah atas dalam kategori Pratama. Meskipun belum mencapai kategori Madya, capaian ini menunjukkan tren kinerja yang cukup positif dan stabil, serta mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Namun demikian, masih terdapat ruang peningkatan untuk mendorong akselerasi capaian agar dapat naik ke kategori Madya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui penguatan sinergi lintas perangkat daerah, optimalisasi intervensi berbasis data, peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas, serta monitoring dan evaluasi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian tahun 2025 ini menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi minimal B terealisasi sebesar 83,25%, melampaui target murni Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 68%, dengan tingkat capaian 122,43%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan keberhasilan kebijakan peningkatan mutu satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Tingginya capaian terhadap target murni mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berhasil memenuhi target minimum yang ditetapkan dalam perencanaan awal, tetapi juga menghasilkan outcome yang melebihi ekspektasi. Peningkatan jumlah satuan pendidikan berakreditasi minimal B mencerminkan perbaikan kualitas pengelolaan sekolah, pemenuhan standar nasional pendidikan, serta peningkatan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berorientasi pada hasil (outcome) dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas serta sasaran RPJMD. Capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada periode berikutnya, khususnya dalam pemerataan mutu pendidikan dan pemenuhan standar layanan dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

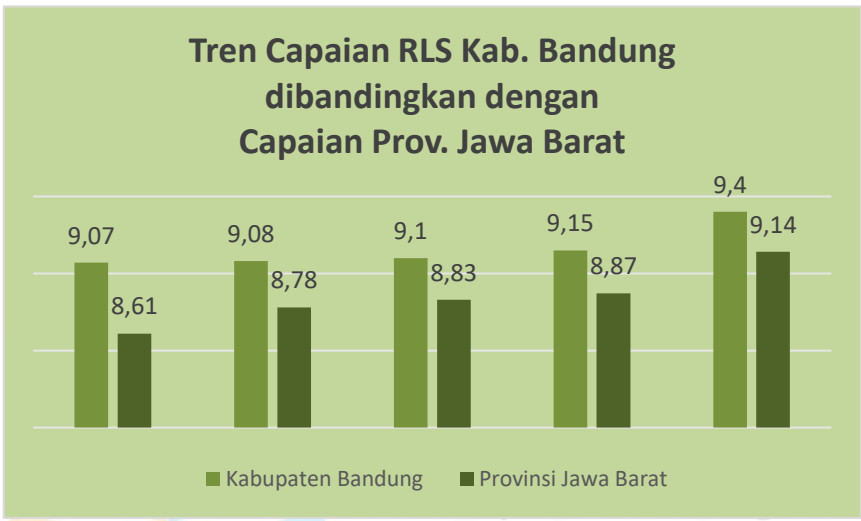
2. Perbandingan realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 8. Realisasi Kinerja Serta Capain Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Murni 2025	Target perubahan 2025	Realisasi 2025	Capaian tahun ini dibandingkan tahun lalu
1	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	9,15	9,8	9,18	9,4	102,73 %
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,74	N/A	12,83	12,99	101,96 %
3	Indeks SPM Pendidikan	75,42	64	75,80	76,25	100,59 %
4	Presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	59,05 %	68 %	N/A	83,25 %	N/A

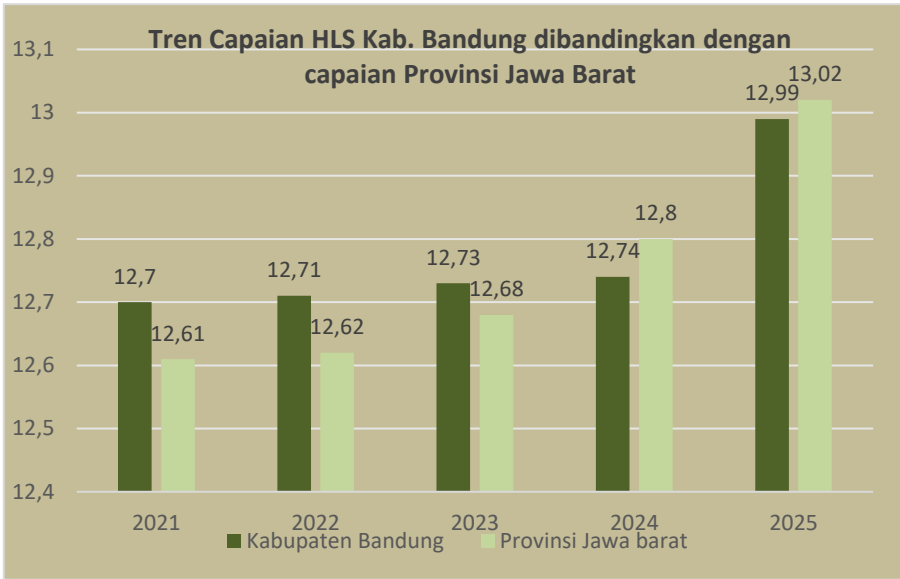
Analisis perbandingan capaian indikator kinerja antara Tahun 2025 dan Tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung secara umum mengalami peningkatan yang konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pendidikan yang dilaksanakan, serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan.

Realisasi Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 9,15 tahun pada Tahun 2024 menjadi 9,4 tahun pada Tahun 2025, atau mengalami peningkatan capaian sebesar 102,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan keberlanjutan partisipasi pendidikan masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.



Gambar 2. Tren Capaian RLS Kab. Bandung dibandingkan Capaian Prov. Jawa Barat

Indikator Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 12,74 tahun pada Tahun 2024 menjadi 12,99 tahun pada Tahun 2025, dengan tingkat capaian 101,96% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peluang pendidikan anak di masa depan.



Gambar 3. Tren Capaian HLS Kab. Bandung dibandingkan Capaian Prov. Jawa Barat

Realisasi Indeks SPM Pendidikan meningkat dari 75,42 pada Tahun 2024 menjadi 76,25 pada Tahun 2025, dengan capaian 100,59% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan secara numerik relatif moderat, capaian ini menunjukkan adanya konsistensi perbaikan kualitas layanan dasar pendidikan.

Gambar. 3. Tren Capaian Index Pendidikan Kab. Bandung



Gambar 4. Tren Capaian Index Pendidikan Kab. Bandung dibandingkan Capaian Prov. Jawa Barat

Berdasarkan grafik tren capaian Indeks Pendidikan Tahun 2022–2025, terlihat adanya peningkatan yang konsisten pada capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Bandung dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2022, capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Bandung sebesar 54,50, relatif setara dengan capaian Provinsi Jawa Barat sebesar 54,54. Pada tahun 2023, Kabupaten Bandung mengalami peningkatan signifikan menjadi 62,11, melampaui capaian Provinsi Jawa Barat yang sebesar 58,08. Peningkatan yang lebih progresif terjadi pada tahun 2024, di mana Indeks Pendidikan Kabupaten Bandung mencapai 75,42, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat sebesar 67,29. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian Kabupaten Bandung sebesar 76,25, tetap berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat yang sebesar 73,43. Secara kumulatif, selama periode 2022–2025, Kabupaten Bandung menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan rata-

rata Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Keunggulan capaian Kabupaten Bandung yang konsisten berada di atas rata-rata provinsi sejak tahun 2023 menunjukkan adanya penguatan tata kelola pendidikan, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, serta optimalisasi intervensi pada indikator-indikator pembentuk Indeks Pendidikan. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah menjaga konsistensi pertumbuhan serta memastikan peningkatan yang dicapai bersifat inklusif dan berkelanjutan, sehingga kesenjangan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dapat terus ditekan.

Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B meningkat signifikan dari 59,05% pada Tahun 2024 menjadi 83,25% pada Tahun 2025. Kenaikan yang sangat tinggi ini mencerminkan lonjakan kualitas tata kelola dan mutu penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target renstra dan RPJMD

Tabel 9. Realisasi Kinerja Tahun Ini

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2025	Target Renstra Perubahan 2025	Target RPJMD 2025	Realisasi 2025	Capain Realisasi thd target renstra perubahan /MURNI	Capain Realisasi thd target RPJMD
1	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	9,8	9,18	9,23	9,41	102.40 %	101,84 %
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	N/A	12,76	12,76	12,90	101,10 %	101,10 %
3	Indeks SPM Pendidikan	64	75,80	N/A	76,25	100,59 5	N/A
4	Presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	68 %	N/A	N/A	83,25 %	122,43 %	N/A

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung secara umum menunjukkan capaian yang melampaui target baik terhadap target Renstra, Renstra Perubahan, maupun target RPJMD yang relevan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), realisasi Tahun 2025 sebesar 9,41 tahun telah melampaui target Renstra Perubahan sebesar 9,18 tahun dengan tingkat capaian 102,40%, serta melampaui target RPJMD Tahun 2025 sebesar 9,23 tahun dengan capaian 101,84%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pendidikan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi pendidikan masyarakat serta meningkatkan lama partisipasi sekolah secara bertahap, meskipun target Renstra murni ditetapkan lebih tinggi. Penyesuaian target melalui Renstra Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kondisi riil di lapangan tanpa mengurangi substansi tujuan pembangunan pendidikan.

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan realisasi sebesar 12,90 tahun, melampaui target Renstra Perubahan dan target RPJMD yang sama-sama ditetapkan sebesar 12,76 tahun, dengan capaian 101,10%. Perlu dijelaskan bahwa indikator HLS belum tercantum dalam Renstra awal, namun dimasukkan dalam Renstra Perubahan sebagai upaya penyempurnaan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dan prospektif. Penambahan indikator HLS bertujuan untuk menggambarkan peluang pendidikan jangka panjang bagi anak usia sekolah dan memperkuat pengukuran kontribusi sektor pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, realisasi Tahun 2025 sebesar 76,25 telah melampaui target Renstra Perubahan sebesar 75,80, dengan tingkat capaian 100,59%. Indikator ini pada Renstra awal ditetapkan dengan target sebesar 64, kemudian disesuaikan dalam Renstra Perubahan untuk mendorong percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan. Sementara itu, indikator Indeks SPM Pendidikan tidak ditetapkan sebagai indikator dalam RPJMD Tahun 2025, sehingga capaian kinerja pada indikator ini tidak diperbandingkan dengan target RPJMD.

Selanjutnya, indikator Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B menunjukkan realisasi Tahun 2025 sebesar 83,25%, melampaui target Renstra awal sebesar 68% dengan tingkat capaian 122,43%. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa indikator ini tidak tercantum dalam Renstra terbaru (Renstra Perubahan) dan tidak menjadi indikator dalam RPJMD Kabupaten Bandung, sehingga digunakan sebagai indikator pendukung untuk menggambarkan peningkatan mutu satuan pendidikan. Meskipun tidak menjadi indikator utama dalam dokumen perencanaan strategis, capaian ini memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan pembinaan mutu dan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak positif terhadap kualitas layanan pendidikan.

Secara keseluruhan, perbedaan penggunaan indikator kinerja antar dokumen perencanaan mencerminkan adanya dinamika dan penyempurnaan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, tanpa mengurangi substansi capaian kinerja Dinas Pendidikan. Seluruh

capaian indikator Tahun 2025 tetap mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan tujuan pembangunan pendidikan Kabupaten Bandung, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan secara berkelanjutan.

4. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 10. Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Nasional	Capaian Realisasi thd target Nasional
1	Rata Rata Lama Sekolah (RLS)	9,41	9,45	99,58 %
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90	13,84	93,21 %
3	Indeks SPM Pendidikan	76,25	100	76,25 %
4	Presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	83,25 %	67,16 %	123,96 %

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan menunjukkan tingkat keselarasan yang bervariasi terhadap target nasional yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan kebijakan sektor pendidikan. Pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), realisasi sebesar 9,41 tahun telah mendekati target nasional 9,45 tahun, dengan capaian 99,58%, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas hampir mencapai standar nasional lama pendidikan yang ditargetkan. Sementara itu, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 12,90 tahun dari target nasional 13,84 tahun, dengan capaian 93,21%, yang mencerminkan masih perlunya penguatan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan lanjutan.

Pada indikator Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, realisasi sebesar 76,25% terhadap target nasional 100% menunjukkan bahwa pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai standar nasional belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan, baik dari aspek akses, mutu layanan, maupun pemerataan pemenuhan hak pendidikan peserta didik. Adapun indikator persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi 83,25% yang melampaui target nasional sebesar 67,16%, atau setara dengan capaian 123,96%, yang mengindikasikan

bahwa mutu kelembagaan satuan pendidikan secara umum telah berada di atas standar nasional yang ditetapkan.

Target nasional pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) mengacu pada indikator pembangunan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan secara resmi dalam dokumen RPJMN 2020–2024 serta arah kebijakan pembangunan pendidikan menuju RPJPN 2025–2045. Target Indeks SPM Pendidikan merujuk pada ketentuan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis Kementerian Dalam Negeri, yang menetapkan target pemenuhan layanan dasar sebesar 100 persen. Sementara itu, target persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B bersumber dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, dengan penilaian mutu satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-S/M).\\

B. Analisis Penyebab Keberhasilan capaian kinerja

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 9,40 tahun, melampaui target murni 9,18 tahun (capaian 102,40%) dan target perubahan 9,23 tahun (capaian 101,84%). Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program peningkatan akses serta keberlanjutan pendidikan telah berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap peningkatan outcome pembangunan pendidikan. Dari perspektif cascading kinerja, keberhasilan RLS ditopang oleh indikator outcome pada Eselon III yang berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan pada seluruh jenjang, termasuk pendidikan formal dan nonformal. Indikator ini selanjutnya diturunkan secara konsisten ke Eselon IV dalam bentuk indikator output yang terukur, antara lain peningkatan partisipasi anak usia sekolah, fasilitasi pendidikan kesetaraan, serta pelaksanaan pendataan dan intervensi terhadap Anak Tidak Sekolah (ATS). Kesesuaian antara target, strategi, dan pelaksanaan kegiatan pada level operasional memperkuat kontribusi kinerja Eselon III dan IV terhadap pencapaian indikator outcome RLS.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) merealisasikan capaian 12,90 tahun, melampaui target perubahan 12,83 tahun dengan tingkat capaian 100,55%. Tidak ditetapkannya target murni pada awal tahun menunjukkan bahwa indikator ini bersifat adaptif terhadap dinamika kebijakan pendidikan dan hasil pemantauan kinerja berjalan. Capaian HLS secara kausal dipengaruhi oleh indikator outcome Eselon III yang diarahkan pada peningkatan peluang masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Indikator tersebut dikaskadekan ke Eselon IV melalui pelaksanaan kegiatan fasilitasi transisi antarjenjang, penguatan layanan pendidikan

dasar dan kesetaraan, serta peningkatan daya tampung satuan pendidikan. Konsistensi logika intervensi antara outcome dan output menunjukkan bahwa cascading kinerja telah dirancang dan diimplementasikan secara memadai untuk mendukung peningkatan HLS.

3. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Realisasi Indeks SPM Pendidikan sebesar 76,25 telah melampaui target murni 64 (capaian 119,14%) serta target perubahan 75,80 (capaian 100,59%). Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal. Secara cascading, indikator ini didukung oleh outcome Eselon III yang menitikberatkan pada peningkatan pemenuhan layanan pendidikan dasar, meliputi aspek akses, mutu layanan, dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Outcome tersebut diturunkan ke Eselon IV dalam bentuk indikator output berupa pemutakhiran data SPM, verifikasi capaian layanan pendidikan, serta intervensi terhadap satuan pendidikan yang belum memenuhi standar. Keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada setiap level cascading menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian indikator ini.

4. Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B

Indikator persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B menunjukkan realisasi sebesar 83,25%, melampaui target murni 68% dengan capaian 122,43%. Capaian ini merefleksikan efektivitas strategi peningkatan mutu kelembagaan satuan pendidikan yang diterapkan secara sistematis. Pada level cascading, indikator ini didukung oleh outcome Eselon III yang berorientasi pada peningkatan tata kelola dan mutu satuan pendidikan. Outcome tersebut dikaskadekan ke Eselon IV melalui indikator output berupa pendampingan akreditasi, pembinaan manajemen sekolah, serta pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Kinerja optimal pada level teknis menunjukkan adanya hubungan kausal yang kuat antara output kegiatan dan outcome peningkatan mutu satuan pendidikan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan pendekatan value for money, yaitu menilai keterkaitan antara input (anggaran dan SDM), output, dan outcome (capaian indikator kinerja utama). Total pagu anggaran sebesar Rp2.388.410.857.721 direalisasikan sebesar Rp2.285.178.942.362 atau 95,68%, yang secara teoritis menunjukkan tingkat efisiensi alokatif yang baik, karena sebagian besar sumber daya dimanfaatkan untuk menghasilkan kinerja tanpa terjadi over-spending.

Dari sisi input non-keuangan, organisasi didukung oleh 33.177 SDM, dengan komposisi mayoritas guru dan tenaga kependidikan, serta hanya 388 ASN staf

administrasi. Struktur ini mencerminkan efisiensi struktural, di mana proporsi SDM lebih banyak dialokasikan pada fungsi inti (core business) pelayanan pendidikan dibandingkan fungsi pendukung. Secara teoritis, struktur SDM yang berorientasi layanan langsung merupakan prasyarat tercapainya efisiensi teknis dalam organisasi sektor publik.

Efisiensi teknis tercermin dari capaian indikator kinerja utama. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,40 tahun atau lebih dari 100% target, yang menunjukkan bahwa belanja dan SDM mampu meningkatkan keberlanjutan pendidikan penduduk secara efektif. Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 12,90 tahun mengindikasikan ekspektasi partisipasi pendidikan yang semakin tinggi, mencerminkan keberhasilan intervensi kebijakan berbasis layanan pendidikan. Sementara itu, Indeks SPM Pendidikan dan persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B yang melampaui target menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya tidak hanya menghasilkan kuantitas layanan, tetapi juga peningkatan mutu pendidikan.

Dari perspektif cost-effectiveness, capaian outcome yang melebihi target dengan tingkat serapan anggaran yang tidak mencapai 100 persen menunjukkan bahwa tambahan belanja tidak lagi menjadi faktor penentu utama pencapaian kinerja. Sebaliknya, kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, serta efektivitas pemanfaatan SDM menjadi faktor dominan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa penggunaan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025 telah mencapai kondisi efisien dan bernilai tinggi (high value for money).

Dengan demikian, secara teoritis dapat disimpulkan bahwa organisasi telah mampu mengelola anggaran dan SDM secara efisien, produktif, dan berbasis outcome, di mana setiap satuan input memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan. Ke depan, fokus peningkatan efisiensi diarahkan pada optimalisasi produktivitas SDM dan penguatan perencanaan berbasis kinerja agar tambahan sumber daya yang dialokasikan benar-benar menghasilkan peningkatan outcome yang proporsional.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, tercermin dari terpenuhinya bahkan terlampauinya target pada seluruh indikator utama bidang pendidikan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,40 tahun, melampaui target murni 9,18 tahun dan target perubahan 9,23 tahun. Capaian ini menandakan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Bandung telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP, sekaligus mencerminkan keberhasilan kebijakan peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan. Sejalan dengan itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat sebesar 12,90 tahun, melampaui target perubahan 12,83 tahun, yang

mengindikasikan semakin terbukanya peluang bagi anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari implementasi program strategis bupati yang secara konsisten memperkuat akses layanan pendidikan. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri sebanyak 23 sekolah hingga tahun 2025 berperan signifikan dalam mengurangi kesenjangan daya tampung dan jarak tempuh sekolah, khususnya di wilayah dengan pertumbuhan penduduk usia sekolah yang tinggi. Penambahan USB ini berdampak langsung pada meningkatnya angka melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan RLS dan HLS Kabupaten Bandung. Selain memperluas akses, keberadaan USB juga memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, yang tercermin dari capaian Indeks SPM Pendidikan sebesar 76,25, melampaui target murni 64 dan target perubahan 75,80.

Di sisi peningkatan mutu layanan pendidikan, pemberian insentif kepada guru honorer sebesar Rp350.000 per bulan berkontribusi dalam menjaga ketersediaan dan motivasi tenaga pendidik, khususnya di sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan guru PNS atau PPPK. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas proses pembelajaran, meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar, serta mendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan. Upaya peningkatan kualitas layanan juga tercermin dari persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B yang mencapai 83,25 persen, jauh melampaui target murni sebesar 68 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan di Kabupaten Bandung telah memenuhi standar mutu nasional, baik dari aspek manajemen sekolah, proses pembelajaran, maupun ketersediaan sarana dan prasarana.

Program Sekolah Mengaji melalui pemberian insentif kepada sekitar 16.000 guru mengaji masing-masing sebesar Rp350.000 per bulan turut memperkuat ekosistem pendidikan yang holistik dan berkarakter. Meskipun tidak diukur secara langsung dalam indikator RLS, HLS, maupun SPM, program ini berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi belajar masyarakat, pembentukan karakter peserta didik, serta penguatan literasi dan nilai-nilai keagamaan, yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan pendidikan formal.

Selain itu, program Beasiswa Bedas Calakan bagi siswa SMP yang tidak diterima di sekolah negeri menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya putus sekolah. Program ini memastikan bahwa keterbatasan daya tampung sekolah negeri tidak menjadi hambatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan, sehingga secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan RLS dan HLS. Upaya tersebut diperkuat melalui program pemberdayaan warga belajar pendidikan kesetaraan yang dipadukan dengan pendidikan kewirausahaan. Program ini bagian dari transformasi pembelajaran pada pendidikan non formal untuk membekali para pengelola dan tutor pendidikan kesetaraan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan agar mereka dapat menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan yang efektif dan memberdayakan peserta didik terutama peserta didik non formal yang membutuhkan keterampilan tambahan untuk meningkatkan taraf hidup. selain itu program ini memberikan kesempatan bagi anak putus sekolah dan masyarakat usia dewasa untuk

memperoleh layanan pendidikan, sekaligus meningkatkan keterampilan hidup, sehingga memperluas jangkauan layanan pendidikan dan meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan pendidikan yang berbasis data. Melalui pendataan yang akurat, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran, baik melalui penyaluran beasiswa, pendidikan kesetaraan, maupun penempatan kembali ke jalur pendidikan formal. Langkah ini berkontribusi dalam menurunkan potensi putus sekolah dan memperkuat capaian indikator pendidikan jangka menengah.

Secara keseluruhan, sinergi antara peningkatan akses melalui pembangunan USB, penguatan mutu layanan melalui dukungan terhadap tenaga pendidik, perluasan jaring pengaman pendidikan melalui beasiswa dan pendidikan kesetaraan, serta kebijakan berbasis data melalui verifikasi ATS, telah membentuk satu kesatuan kebijakan yang saling melengkapi. Integrasi program strategis tersebut menjadi faktor utama keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam mencapai dan melampaui target kinerja pendidikan Tahun 2025, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan juga diperkuat melalui inovasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa penerapan PAUD Holistik Integratif. Inovasi ini dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas sektor, melibatkan perangkat daerah terkait, layanan kesehatan, perlindungan anak, serta unsur masyarakat. Pendekatan holistik integratif memastikan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara menyeluruh, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan. Implementasi PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Bandung telah menjadi praktik baik (best practice) dan memperoleh apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena dinilai mampu memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia sejak usia dini serta mendukung peningkatan mutu layanan PAUD secara berkelanjutan.

Selain penguatan layanan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung secara konsisten mendorong peningkatan mutu pembelajaran melalui fasilitasi dan penguatan komunitas belajar guru. Komunitas belajar dikembangkan sebagai wadah kolaboratif bagi guru untuk saling berbagi praktik baik, meningkatkan kompetensi pedagogik, serta mengembangkan pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Melalui komunitas belajar yang aktif, kolaboratif, dan reflektif, sekolah didorong untuk tumbuh menjadi sekolah unggulan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Komunitas belajar ini berperan sebagai media penggerak utama dalam transformasi pembelajaran, sekaligus menjadi sarana penguatan budaya belajar berkelanjutan di lingkungan satuan pendidikan.

Komitmen peningkatan mutu pendidikan juga diwujudkan melalui percepatan digitalisasi pembelajaran. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung secara bertahap membangun ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, termasuk fasilitasi dan pelatihan penggunaan

Interactive Flat Panel (IFP) di satuan pendidikan. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan perangkat pembelajaran digital secara efektif, interaktif, dan kontekstual. Digitalisasi pembelajaran tidak hanya mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tetapi juga mendorong inovasi metode pembelajaran yang lebih menarik, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik.

Selanjutnya, berbagai kegiatan peningkatan kompetensi guru terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan pedagogik, penguatan literasi dan numerasi, pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, maupun peningkatan kapasitas guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Upaya ini memperkuat profesionalisme pendidik dan memastikan kesiapan guru dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan belajar, sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja pendidikan, khususnya Indeks SPM dan mutu satuan pendidikan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan hasil dari sinergi kebijakan yang terintegrasi antara peningkatan akses pendidikan, penguatan mutu layanan, inovasi PAUD Holistik Integratif, pengembangan komunitas belajar guru, percepatan digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi pendidik yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Integrasi program strategis tersebut menjadi faktor kunci keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam mencapai dan melampaui target kinerja, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing.

Berikut dokumentasi terkait program program unggulan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung :



Gambar 5. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri





Gambar 6. Program Pemberdayaan Warga Belajar PKBM



Gambar 7. Impelementasi Program PAUD-HI

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 dianalisis berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran per program dan kegiatan. Secara keseluruhan, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp2.388.410.857.721**, dengan realisasi sebesar **Rp2.285.178.942.362** atau mencapai **95,68%**. Dengan demikian, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp103.231.915.359** atau sekitar **4,32%** dari total pagu yang tersedia.

Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan telah berjalan secara efektif dan terkendali, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi. Capaian realisasi yang mendekati optimal mencerminkan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, serta selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Sisa anggaran yang masih terdapat hingga akhir tahun anggaran pada umumnya disebabkan oleh efisiensi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa yang menghasilkan penghematan belanja. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan. Secara keseluruhan, kinerja realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan daerah.

Tabel 11. Kinerja Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
	2	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2,388,410,857,71	2,285,178,942,38	95,1	103,231,915,33
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,470,260,870,896	1,377,545,351,858	93,69	92,715,519,038
1.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	934,267,509	564,458,798	60,42	369,808,711
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	289,318,194	191,126,300	66,06	98,191,894
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45,168,800	26,644,500	58,99	18,522,300
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20,490,800	-	-	20,490,800
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	146,480,500	70,528,800	48,15	75,951,700
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147,623,508	74,665,200	50,58	72,958,308
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	103,505,800	93,972,248	90,79	9,533,552
1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	181,681,907	107,521,750	59,18	74,160,157
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,463,139,917,205	1,371,818,741,063	93,76	91,321,176,142
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,463,059,623,205	1,371,742,750,563	93,76	91,316,872,642
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	80,294,000	75,990,500	94,64	4,303,500
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,021,138,328	786,886,100	77,26	232,250,228
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	322,364,000	289,231,500	89,72	33,132,500
1.01.01.2.03.0006	SKPD	698,774,328	499,656,600	71,50	199,117,728
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	470,170,322	136,125,500	28,95	334,044,822
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50,000,000	40,159,800	80,32	9,840,200
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	187,541,414	88,762,400	36,67	118,779,014
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	53,220,000	27,203,300	51,11	26,016,700
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	179,408,908	-	-	179,408,908
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,002,010,495	953,832,977	87,35	138,177,518
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,792,100	27,183,900	88,28	3,608,200

Kode	Anggaran	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	542,737,400	527,897,963	97.27	14,839,437
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244,223,495	191,491,930	78.41	52,731,565
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	80,193,000	79,820,988	99.54	372,012
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126,890,000	92,149,000	72.62	34,741,000
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,174,500	35,289,196	52.53	31,885,304
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,074,939,832	3,016,307,131	98.09	58,632,701
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200,000,000	168,356,563	84.18	31,643,437
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,874,939,832	2,847,950,568	99.06	26,989,264
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528,427,205	266,998,289	50.53	261,428,916
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55,559,800	32,316,400	58.17	23,243,400
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150,000,000	149,294,069	99.53	705,931
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	322,867,405	85,387,820	26.45	237,479,585

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	917,144,560,975	906,724,896,204	98.86	10,419,664,771
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	497,245,146,058	494,148,265,999	99.38	3,096,880,059
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12,860,097,999	12,581,362,554	97.83	278,735,445
1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	224,742,500	191,162,744	85.06	33,579,756
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	24,069,786,900	23,649,819,938	98.26	419,966,962
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	15,332,679,800	14,162,609,505	92.37	1,170,070,295
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	404,200,000	403,403,500	99.80	796,500
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	28,785,938,000	28,682,280,000	99.64	103,658,000
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	153,755,300	153,602,000	99.90	153,300
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	832,621,200	832,067,900	99.93	553,300
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	338,699,459,091	338,665,533,384	99.99	33,925,707
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200,000,000	197,069,200	98.53	2,930,800
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	122,378,050	121,985,000	99.68	393,050
1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	156,310,600	155,014,000	99.17	1,296,600
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	427,921,300	427,203,000	99.83	718,300
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	10,725,594,100	10,073,749,394	93.92	651,844,706
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2,100,764,800	2,023,481,078	96.32	77,283,722
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	56,651,663,200	56,404,739,722	99.56	246,923,478
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5,497,231,218	5,423,183,080	98.65	74,048,138

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	271,647,291,270	266,569,479,030	98.13	5,077,812,240
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	12,360,500,650	12,113,856,359	98.00	246,644,291
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	3,138,199,440	3,113,614,461	99.22	24,584,979
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5,714,634,301	5,664,270,532	99.12	50,363,769
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9,326,304,956	9,058,693,151	97.13	267,611,805
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	14,382,739,300	14,231,697,879	98.95	151,041,421
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	9,597,126,370	9,457,763,998	98.55	139,362,372
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,500,000,000	1,490,416,800	99.36	9,583,200
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	423,737,500	392,167,747	92.55	31,569,753
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18,399,035,100	17,623,568,650	95.79	775,466,450
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	461,662,000	368,279,300	79.77	93,382,700
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	344,255,550	340,929,000	99.03	3,326,550
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	163,450,113,503	163,152,229,482	99.82	297,884,021
1.01.02.2.02.0054	Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	109,770,600	109,243,900	99.52	526,700
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	109,770,600	-	-	109,770,600
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	18,957,745,200	17,387,481,500	91.72	1,570,263,700
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	10,436,250,700	9,278,797,675	88.91	1,157,453,025
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	312,112,000	301,494,600	96.60	10,617,400
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2,623,333,500	2,484,973,996	94.73	138,359,504

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	103,371,351,176	101,681,204,839	98.36	1,690,146,337
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	701,898,730	698,515,100	99.52	3,383,630
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	6,138,460,000	6,129,397,980	99.85	9,062,020
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	8,194,794,100	8,189,674,740	99.94	5,119,360
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	22,988,320,000	22,535,968,950	98.03	452,351,050
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	422,621,200	392,672,800	92.91	29,948,400
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	382,621,200	336,830,000	88.03	45,791,200
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	42,767,850,600	42,344,529,895	99.01	423,320,705
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	550,000,000	511,778,400	93.05	38,221,600
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	263,421,200	249,065,600	94.55	14,355,600
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,538,594,000	1,530,451,050	99.47	8,142,950
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	54,136,650	54,136,500	100.00	150
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	414,865,900	225,070,900	54.25	189,795,000
1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	900,000,000	534,435,600	59.38	365,564,400
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1,130,613,896	1,119,853,500	99.05	10,760,396
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	16,599,732,500	16,522,067,224	99.53	77,665,276
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	323,421,200	306,756,600	94.85	16,664,600

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	44,880,772,471	44,325,946,336	98.76	554,826,135
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15,588,226,000	15,283,630,400	98.05	304,595,600
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500,000,000	411,880,100	82.38	88,119,900
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,851,000,000	3,788,399,500	98.37	62,600,500
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	21,256,036,872	21,191,080,700	99.69	64,956,172
1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	556,557,645	530,243,000	95.27	26,314,645
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	627,828,400	626,112,700	99.73	1,715,700
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	111,742,700	111,742,200	100.00	500
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	782,596,980	781,259,200	99.83	1,339,780
1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	345,478,537	344,956,066	99.85	522,471
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	844,440,000	842,134,800	99.73	2,305,200
1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	416,863,337	414,507,670	99.43	2,355,667
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	600,000,000	508,081,400	84.68	91,918,600
1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	182,548,000	91.27	17,452,000
1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	182,548,000	91.27	17,452,000
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	400,000,000	325,533,400	81.38	74,466,600
1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	172,995,200	86.50	27,004,800
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200,000,000	152,538,200	76.27	47,461,800
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	405,425,850	400,612,900	98.81	4,812,950
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	405,425,850	400,612,900	98.81	4,812,950
1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	405,425,850	400,612,900	98.81	4,812,950

Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp2.285.178.942.362** atau **95,68%** dari total pagu **Rp2.388.410.857.721** menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Tingkat serapan tersebut kemudian disandingkan dengan capaian indikator kinerja utama perangkat daerah yang secara umum **melampaui target yang ditetapkan**, sehingga memberikan gambaran hubungan positif antara penggunaan sumber daya keuangan dengan pencapaian kinerja pembangunan pendidikan.

Beberapa indikator strategis menunjukkan capaian yang melampaui target, antara lain:

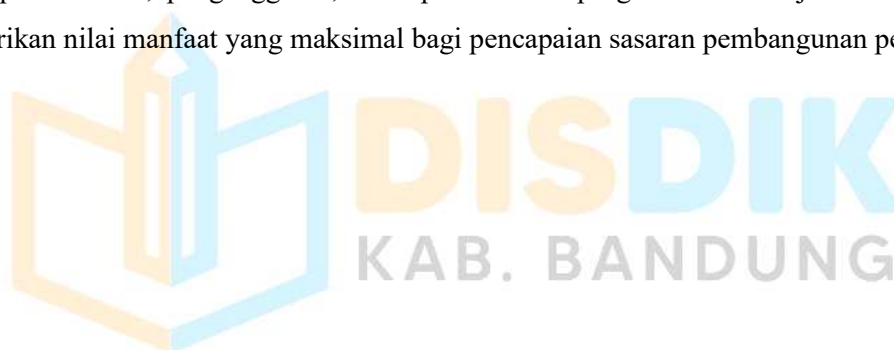
- a. **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** terealisasi **9,41 tahun**, melampaui target perubahan **9,18 tahun** (capaian 101,84% terhadap target RPJMD).
- b. **Harapan Lama Sekolah (HLS)** terealisasi **12,90 tahun**, melampaui target **12,76 tahun** (capaian 101,10%).
- c. **Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan** terealisasi **76,25**, melampaui target **75,80**.

- d. **Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B** mencapai **83,25%**, jauh melampaui target (capaian 122,43%).

Capaian indikator yang melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 100% menunjukkan bahwa perangkat daerah mampu menghasilkan kinerja yang optimal tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran. Kondisi ini mencerminkan **efisiensi penggunaan sumber daya**, dimana output dan outcome yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan sumber daya yang digunakan.

Dari sisi **efektivitas**, capaian indikator kinerja yang sebagian besar melampaui target menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Peningkatan RLS dan HLS menunjukkan keberhasilan memperluas akses dan keberlanjutan pendidikan, sementara peningkatan Indeks SPM dan akreditasi satuan pendidikan mencerminkan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 tergolong **efektif dan efisien**, ditunjukkan oleh tingginya capaian indikator kinerja yang melampaui target dengan tingkat penyerapan anggaran yang optimal. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program telah berjalan selaras dan memberikan nilai manfaat yang maksimal bagi pencapaian sasaran pembangunan pendidikan daerah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dari aspek penyerapan anggaran maupun capaian indikator kinerja utama. Realisasi anggaran sebesar Rp2.285.178.942.362 atau 95,68% dari total pagu Rp2.388.410.857.721 mencerminkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan terkendali. Tingkat serapan tersebut selaras dengan capaian kinerja perangkat daerah yang secara umum melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga menunjukkan adanya hubungan positif antara pengelolaan sumber daya keuangan dengan pencapaian hasil pembangunan pendidikan.

Pelaksanaan kinerja tersebut berada dalam kerangka kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam pengelolaan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, termasuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 mencerminkan pelaksanaan mandat konstitusional daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas layanan pendidikan yang bermutu.

Beberapa indikator strategis menunjukkan kinerja yang melampaui target, antara lain Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang terealisasi sebesar 9,41 tahun atau 101,84% dari target RPJMD, serta Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai 12,90 tahun atau 101,10% dari target. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan terealisasi sebesar 76,25 melampaui target 75,80, dan persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B mencapai 83,25% atau 122,43% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan pada aspek akses, mutu, dan tata kelola layanan pendidikan.

Tingginya capaian indikator kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 100% mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya. Perangkat daerah mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal tanpa harus menghabiskan seluruh pagu anggaran, yang menunjukkan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program yang semakin baik.

Namun demikian, dalam proses pencapaian kinerja tersebut masih terdapat berbagai permasalahan strategis. Kesenjangan mutu antar satuan pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa wilayah, serta belum meratanya distribusi dan kompetensi tenaga pendidik masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Selain itu, dinamika regulasi dan kebijakan fiskal daerah turut memengaruhi fleksibilitas pengelolaan anggaran pendidikan.

Permasalahan yang cukup krusial pada Tahun 2025 adalah kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan pendidikan. Kebijakan ini menuntut kesiapan fiskal daerah karena pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK Paruh Waktu harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara pada saat yang sama terjadi penyesuaian dan pengurangan Transfer Keuangan ke Daerah dari Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan terhadap belanja pegawai dalam struktur APBD dan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja program prioritas lainnya, termasuk peningkatan sarana prasarana dan mutu pembelajaran.

Situasi ini menuntut perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih cermat, sinkronisasi antara kebijakan pengangkatan dengan kapasitas fiskal daerah, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian belanja pegawai agar tetap berada dalam batas kemampuan keuangan daerah. Tantangan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dan keberlanjutan fiskal daerah.

Dengan demikian, kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2025 dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam kerangka pelaksanaan kewenangan daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, berbagai tantangan struktural, termasuk tekanan fiskal akibat pembiayaan PPPK Paruh Waktu dan penyesuaian transfer keuangan daerah, perlu menjadi perhatian dalam perencanaan tahun berikutnya. Capaian ini sekaligus menjadi fondasi untuk memperkuat tata kelola, efisiensi anggaran, dan pemerataan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

B. Langkah Kedepan

Sebagai tindak lanjut atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2025, Dinas Pendidikan akan melakukan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penguatan efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan pembangunan pendidikan daerah. Langkah ke depan dirancang dengan tetap mengacu pada kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan fiskal terkini.

Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja akan terus ditingkatkan melalui penyempurnaan perencanaan berbasis data (evidence-based planning). Optimalisasi pemanfaatan data pendidikan, termasuk data partisipasi sekolah, mutu satuan pendidikan, serta kebutuhan riil sarana dan prasarana, akan menjadi dasar dalam penentuan prioritas program dan alokasi anggaran agar semakin tepat sasaran dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun daerah.

Kedua, upaya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan difokuskan pada penanganan kesenjangan antar wilayah dan antar satuan pendidikan. Intervensi diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, penguatan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pembinaan dan pendampingan satuan pendidikan dalam rangka peningkatan akreditasi dan kualitas pembelajaran. Pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat, akan diperkuat untuk memperluas dukungan terhadap peningkatan mutu layanan.

Ketiga, dalam menghadapi tantangan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan implikasi pembiayaannya terhadap APBD, Dinas Pendidikan akan mendorong penyusunan analisis kebutuhan pegawai yang lebih komprehensif dan terukur. Langkah ini meliputi penataan distribusi tenaga pendidik, optimalisasi beban kerja, serta pengendalian pertumbuhan belanja pegawai agar tetap selaras dengan kapasitas fiskal daerah. Koordinasi intensif dengan perangkat daerah pengelola keuangan dan kepegawaian akan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan dan keberlanjutan fiskal daerah.

Keempat, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja akan terus ditingkatkan melalui penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi program secara berkala. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada realisasi fisik dan keuangan, tetapi juga pada pengukuran outcome dan dampak terhadap peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Kelima, Dinas Pendidikan akan memperkuat inovasi layanan pendidikan, termasuk pengembangan pembelajaran berbasis teknologi dan peningkatan kompetensi pendidik, guna menjawab tantangan perubahan sosial dan perkembangan era digital. Inovasi tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas lulusan.

Secara keseluruhan, langkah ke depan diarahkan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja yang telah melampaui target, sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan struktural dan fiskal yang dihadapi. Dengan perencanaan yang adaptif, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta komitmen terhadap pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Pendidikan optimis dapat terus meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan pembangunan pendidikan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Kilometer 17 - Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Telepon 022-5897517 Kode Pos 40512
Laman : <https://disdik.bandungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : **421 / 3766** - Disdik 2025

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung periode 2025-2029, yaitu "Kabupaten Bandung lebih bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas", diperlukan peningkatan mutu sumber daya manusia melalui sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas;
- b. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan jangka menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran SK ini.;
- IKU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Pendidikan.;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : September 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Asep Kusumah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199110 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 421 / 3766- Disdik/2025
TANGGAL : September 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029

NO	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional / Sumber data
	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak	Meningkatnya akses, mutu pendidikan, dan kompetensi dasar masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	BPS Kabupaten
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	BPS Kabupaten

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Asep Kusumah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720105 199110 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENJANG WAHYUDIN, S.AP., M.IP

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si

Jabatan : BUPATI BANDUNG

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si



4147/b40b5

PIHAK PERTAMA,

ENJANG WAHYUDIN, S.AP., M.IP

Pembina

NIP. 197212201998031007

Dokumen ini dikeluarkan secara otomatis melalui aplikasi SIAKANG <https://siakang.bandungkab.go.id> dan dapat dicek melalui QRCode dihalaman ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	• RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	• 9.18 Poin
1	Meningkatnya Perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas	• capaian SPM Pendidikan Kabupaten	• 64 %
2	Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi dan layanan pendidikan	• presentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B	• 68.00 %
II.	Meningkatnya kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	• Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	• 85.00 %
3	meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan	• nilai AKIP • nilai BMD	• 82.00 Poin • 94.00 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.145.098.972.745,44	APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	306.240.295.360,00	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	700.000.000,00	APBD
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	239.502.460,00	APBD
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	600.000.000,00	APBD
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	583.174.000,00	APBD
TOTAL		1.453.461.944.565,44	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

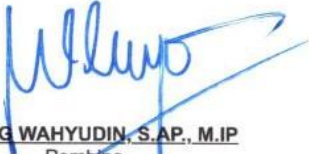
Soreang, 10 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

BUPATI BANDUNG,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si




ENJANG WAHYUDIN, S.AP., M.IP
Pembina
NIP. 197212201998031007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASEP KUSUMAH, S.SOS, M.SI

Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si

Jabatan : BUPATI BANDUNG

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Soreang, 25 September 2025

PIHAK KEDUA,

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si



6579/debd8

PIHAK PERTAMA,

ASEP KUSUMAH, S.SOS, M.SI

Pembina Utama Muda
NIP. 197201051991011003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KEPALA DINAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	• RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	• 9.23 Tahun
1	Meningkatnya Perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas	• capaian SPM Pendidikan Kabupaten	• 75.80 %
2	Meningkatnya peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	• 12.83 %
II.	Meningkatnya kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	• Indek kepuasan Masyarakat (IKM)	• 75.80 %
3	meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan	• nilai AKIP • nilai BMD	• 82.00 Poin • 94.00 %

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.469.226.527.896,00	APBD-P
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	916.494.560.975,00	APBD-P
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	APBD-P
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	APBD-P
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	600.000.000,00	APBD-P
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	405.425.850,00	APBD-P
TOTAL		2.386.726.514.721,00	

Berkomitmen menghasilkan minimal satu jenis inovasi baru dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah dan Percepatan pencapaian target program strategis Bupati.

Soreang, 25 September 2025

BUPATI BANDUNG,

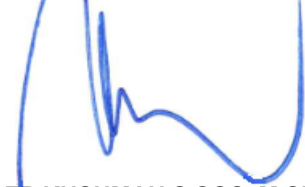


Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.Ip., M.Si



6579/debd8

PIHAK PERTAMA,



ASEP KUSUMAH, S.SOS, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 197201051991011003

4. Format Rencana Aksi (Format baru dari Kementerian PAN dan RB)

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
Meningkatnya tata kelola tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik	Nilai AKIP Kabupaten	72,35	meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pemerintahan bidang pendidikan	nilai AKIP	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 81,64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		nilai SAKIP	poin	83	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 83	SEKRETARIS DINAS
				nilai BMD	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 93.88		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	dokumen	10	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : 5 TW 4 : 4	PERENCANA AHLI MUDA
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	1	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	PERENCANA AHLI MUDA
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	4	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 4 TW 4 :	PERENCANA AHLI MUDA
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	10	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 10 TW 4 :	PERENCANA AHLI MUDA
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang diselesaikan tepat waktu	Dokumen	10	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 10	PERENCANA AHLI MUDA
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	TW 1 : 3 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	PERENCANA AHLI MUDA
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang diselesaikan secara tepat waktu	Laporan	2	TW 1 : 2 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	PERENCANA AHLI MUDA
							Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	dokumen	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	PERENCANA AHLI MUDA
							Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	PERENCANA AHLI MUDA
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	persentase	100	TW 1 : 25 TW 2 : 25 TW 3 : 25 TW 4 : 25	BENDAHARA

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai ASN	Orang/ bulan	12	TW 1 : 3.924 TW 2 : 2.353 TW 3 : 2.725 TW 4 : 2.353	BENDAHARA
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	Laporan	36	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 :	BENDAHARA
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	persentase	100	TW 1 : 25 TW 2 : 25 TW 3 : 25 TW 4 : 25	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan BMD yang disusun dan diselesaikan tepat waktu	Laporan	6	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 6	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD	Laporan	5	TW 1 : TW 2 : 1 TW 3 : 3 TW 4 : 1	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	persentase	100	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 100 TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	120 Paket	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 120 TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	0	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	50	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 50 TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	persentase	100	TW 1 : 54 TW 2 : 24 TW 3 : 11 TW 4 : 11	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	Paket	7	TW 1 : TW 2 : 7 TW 3 : TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Paket	40	TW 1 : 40 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan	Paket	4	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 4 TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	Paket	8	TW 1 : 8 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyaknya kunjungan tamu dalam satu tahun	Laporan	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya kegitan rapat koordinasi dalam waktu satu tahun	Laporan	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	persentase	100	TW 1 : 25 TW 2 : 17 TW 3 : 33 TW 4 : 25	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa layanan listrik dalam waktu 1 tahun	Laporan	5	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 5	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir Jumlah Tenaga Harian Lepas Jumlah tenaga Kebersihan	Laporan	5	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 5	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	persentase	94	TW 1 : 34 TW 2 : 24 TW 3 : 17 TW 4 : 25	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	TW 1 : 1 TW 2 : 4 TW 3 : 5 TW 4 : 8	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	TW 1 : TW 2 : 1 TW 3 : TW 4 :	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas	RLS (Rata Rata Lama Sekolah)	9,60 point	Meningkatnya Perluasan akses dan pemerataan Pendidikan yang berkualitas	capaian SPM Pendidikan Kabupaten	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 78.61	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		- tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	index	75	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 75	

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
								- tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	index	97,5	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 97,5	
								- tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan	index	70	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 70	
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD	persentase	105,43	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 105,43	KEPALA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN KURIKULUM
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	102	TW 1 : 11 TW 2 : 7 TW 3 : 84 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	20	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 20	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 2	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	230	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 230	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 3	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	200	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 200	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satua Pendidikan Sekolah Dasar	orang	9395	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 9395	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	300	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 300	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	satuan pendidikan	200	TW 1 : 200 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	310	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :310	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan	dokumen	1	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Sosialisasi Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan di Bidang Pendidikan yang di Laksanakan	dokumen	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :1	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	10	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :10	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :2	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	7	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 7	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah direhabilitasi sedang/berat	Unit	75	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 75	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan	1412	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1412	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang /PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	500	TW 1 : 4 TW 2 : 496 TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 2	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD
							Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP	persentase	97	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 97	KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	jumlah sekolah Baru yang telah dibangun	Unit	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 2	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembangunan fasilitas parkir yang dibangun	Unit	10	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 10	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Unit	26	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 26	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	ruang	36	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 36	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	paket	63	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 63 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	paket		TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	833	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 833 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	8	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 8 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satua Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	150	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 150	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	200	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 200 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	200	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 200 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	76	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 76 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas	10	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 10	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 2	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	1583	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1583	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	15	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 15 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang /PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	200	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 200	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SMP
							Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	persentase	36,76	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 36,76	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	10	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 10 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Pengadaan Mebel Paud	Jumlah Mebel PAUD yang tersedia	Paket	153	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 153 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Pengadaan Perlengkapan Paud	Jumlah Perlengkapan PAUD yang tersedia	Paket	81	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 81 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia di PAUD	ORANG	5416	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 5416 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	ORANG	300	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 300 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	200	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 200 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1793	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1793 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi di Bidang Pendidikan	dokumen	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	dokumen		TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang		TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 2 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang /PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang	200	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 200 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	Paket	67	TW 1 : 67 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	287	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 287 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD
							Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	satuan pendidikan	150	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 150 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APK Kejar Paket	presentase	44	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 44	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL / KESETARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	ORANG	78	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 78 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF
							Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	ORANG	78	TW 1 : 78 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan		TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNF
							Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	78	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 78 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNF
							Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	2	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 2 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	95	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 95 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNF
							Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	6000	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 6000 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNF
							Pengadaan mebel sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	61	TW 1 : 61 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNF
							Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Unit	60	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 60 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	3	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 3 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF
							Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 3 TW 4 :	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PNF
			Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang berkualitas, efektif, dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi dan layanan pendidikan	skor pemetaan mutu	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Nilai Standar Isi Nilai Karakter Jenjang SD Nilai Karakter Jenjang SMP	point point point	0 53,82 54,21		KEPALA BIDANG SEKOLAH DASAR DAN KURIKULUM
							Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Dasar	Persentase Peserta Didik SD dan SMP yang tuntas dalam pembelajaran Muatan Lokal	persentase	98	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 98	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	orang	100	TW 1 : 4 TW 2 : 96 TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersusun	dokumen	200	TW 1 : TW 2 : 200 TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase peserta didik PAUD DAN PNF yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal	%	100	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
							Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	buku	2.000	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 2000 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH DASAR
						PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN		indeks pemerataan guru kelas SD Index Distribusi Guru SD Index pemerataan guru mapel SD Index Distribusi Guru SMP index pemerataan guru mapel SMP Index Distribusi Guru PAUD Index pemerataan guru matpel SD	indeks indeks indeks indeks poin indeks Indeks	0,22 0,46 0,43 0,41 0,43 0,93 0,46	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
							Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pemerataan guru kelas SD Pemerataan guru Mapel SMP Pemerataan guru Matpel SD Pemerataan guru UN SMP	persen persen persen persen	0,4 0,17 0,43 0,19		KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
							Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	5	TW 1 : 5 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMP
						PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		nilai standar pengelolaan presentase satuan pendidikan berakreditasi	persen persen	100 80		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
							Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga SD dan SMP yang Memiliki ijin Operasional	Lembaga	30	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 30	
							Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat	dokumen	4	TW 1 : 4 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
							Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	jumlah lembaga SD dan SMP yang memiliki ijin operasional	Lembaga	125	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 125	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

TUJUAN			SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
							Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	2	TW 1 : 2 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
							Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	TW 1 : 1 TW 2 : TW 3 : TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PAUD
						PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah	persen indeks	100 0,4		KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL / KESETARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
							Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	hasil persentase peningkatan kualitas kelestarian bahasa dan sastra	persentase	100	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 100	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL / KESETARAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
							Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa	1	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 1 TW 4 :	KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PNF



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

ENJANG WAHYUDIN, S.AP, M.IP
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tabel Daftar Penghargaan di Lingkungan Dinas Pendidikan

No	Nama Penghargaan	Tingkat (Nasional/Prov/Jabar/Kab)	Pemberi Penghargaan	Unit/ Bidang/ Sekolah Penerima	Uraian Singkat Prestasi	Tahun Perolehan	Bukti/Dokumen Pendukung	Keterangan
1	GP3M	Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara 1 GP3M	2019		
2	Tutor Kesetaraan Apresiasi PTK PNF	Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Harapan II	2020		
3	Pekan Olahraga FTPK	Kabupaten Bandung	Forum PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara 1 Ganda Putra	2022		
4	Pekan Olahraga FTPK	Kabupaten Bandung	Forum PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara III Ganda Putri	2022		
5	Pekan Olahraga FTPK	Kabupaten Bandung	Forum PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara III Ganda Campuran	2022		

No	Nama Penghargaan	Tingkat (Nasional/Prov/Jabar/Kab)	Pemberi Penghargaan	Unit/ Bidang/ Sekolah Penerima	Uraian Singkat Prestasi	Tahun Perolehan	Bukti/Dokumen Pendukung	Keterangan
6	Pupuh Putri	Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara I Pupuh Putri	2023		
7	Biantara Putra	Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara III Biantara Putra	2023		
8	Ngadongeng Putri	Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM Sangkanhurip	Juara III Ngadongeng Putri	2023		
9	Tutor Terbaik 2024	Kabupaten Bandung	Dinas Pendidikan Kab	PKBM Sangkanhurip	Tutor Terbaik	2024		
10	Video Inspirasi Praktik Baik Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun Melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan/atau Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2025	Nasional	Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah	PKBM Sangkanhurip	Peserta Video Inspirasi Praktik Baik Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun Melalui Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan/atau Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) Jenjang SMP/Sederajat Tahun 2025	2025		
1	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS	Kabupaten	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara 1 tingkat Kabupaten atas dedikasi dan inovasi dalam pengelolaan serta peningkatan mutu layanan PAUD dan Dikmas.	2018		

No	Nama Penghargaan	Tingkat (Nasional/Prov/Jabar/Kab)	Pemberi Penghargaan	Unit/ Bidang/ Sekolah Penerima	Uraian Singkat Prestasi	Tahun Perolehan	Bukti/Dokumen Pendukung	Keterangan
2	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS	Provinsi	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara 1 tingkat Provinsi atas kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan PAUD dan Dikmas yang berdampak bagi masyarakat.	2018	https://drive.google.com/file/d/1i5jU8uDZxhZhIdpMOaLkrgp-Cr_4xso/view?usp=sharing	
3	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS	Nasional	Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara III tingkat Nasional sebagai bentuk pengakuan atas praktik baik dan inovasi pengelolaan PAUD dan Dikmas.	2018		
4	Pemberdayaan Perempuan	Kecamatan	Camat Ibum	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Pengakuan atas peran aktif dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga.	2018		
5	CECT Sustainability Award “Pendidikan dan Kesehatan”	CECT Sustainability Award	Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan atas inovasi berkelanjutan dalam bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.	2018		
6	Pertamina Award (Kategori Berdikari)	Nasional	Direktur Utama PT. Pertamina	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara 1 Nasional atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan dan kewirausahaan.	2018		
7	Penerimaan Anugerah Bidang Pendidikan Pengelola PKBM	Kabupaten	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Pengakuan sebagai pengelola PKBM berprestasi atas dedikasi dalam pengembangan layanan pendidikan masyarakat.	2018		
8	Lomba Inovasi Pengentasan Kemiskinan (BAPPEDA)	Kabupaten	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara 1 atas inovasi program pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.	2019		
9	Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS	Kabupaten	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara 1 atas konsistensi dan dedikasi dalam peningkatan mutu layanan PAUD dan Dikmas.	2020		
10	Pengentasan Buta Aksara HAI	Nasional	Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan atas kontribusi nyata dalam pelaksanaan program pengentasan buta aksara.	2020		
11	Perempuan Inisiator Indonesia	Nasional	Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Pengakuan nasional atas inisiatif dan kepemimpinan dalam pemberdayaan perempuan dan pendidikan masyarakat.	2020		
12	Penghargaan Pengabdian Kepada Dunia Pendidikan Bupati Kabupaten Bandung	Kabupaten	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan atas pengabdian dan dedikasi berkelanjutan dalam pengembangan dunia pendidikan.	2021		

No	Nama Penghargaan	Tingkat (Nasional/Prov/Jabar/Kab)	Pemberi Penghargaan	Unit/ Bidang/ Sekolah Penerima	Uraian Singkat Prestasi	Tahun Perolehan	Bukti/Dokumen Pendukung	Keterangan
13	Partisipasi Sabilulungan Pembangunan di Kabupaten Bandung (Pendidikan dan Pemberdayaan Perempuan)	Kabupaten	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Pengakuan atas partisipasi aktif dalam pembangunan pendidikan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bandung.	2021		
14	Penghargaan Dedikasi Atas Lokal Hero (Pertamina)	Nasional	Direktur Utama PT. Pertamina	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan nasional atas dedikasi sebagai Local Hero dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.	2021		
15	Lomba PKBM/SKB berprestasi	Nasional	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Juara 1 Nasional sebagai PKBM berprestasi dengan inovasi layanan pendidikan masyarakat.	2021		
16	Lomba Kreatifitas dan Inovasi Produk Pendidikan kesetaraan kategori TIK	Nasional	Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih Harapan 1 Nasional atas kreativitas dan inovasi produk pendidikan kesetaraan berbasis TIK.	2021		
17	Anugerah Pegiat Perempuan	Nasional	Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan nasional atas kontribusi aktif sebagai pegiat perempuan dalam pemberdayaan masyarakat.	2021		
18	PKBM Percontohan Internasioanl	Nasional	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penetapan sebagai PKBM percontohan internasional atas praktik baik dan inovasi pendidikan masyarakat.	2023		
19	IKM Pemberdayaan Masyarakat	Nasional		PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Pengakuan nasional atas keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dengan tingkat kepuasan yang tinggi.	2023		
20	Mahasiswa Lulusan Terbaik			Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Meraih predikat lulusan terbaik sebagai bentuk prestasi akademik.	2024		
21	Mitra Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kabupaten	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan atas peran sebagai mitra pembangunan dalam penguatan ekonomi keluarga.	2024		
22	Fasilitator Kewirausahaan Terbaik Tahun 2025	Kabupaten	Bupati Bandung	PKBM AN-NUR IBUN/Dr. Yanti Lidiati, S.E., M.M.	Penghargaan sebagai fasilitator kewirausahaan terbaik tingkat kabupaten.	2025		

Tabel Daftar Inovasi di Lingkungan Dinas Pendidikan

No	Nama Inovasi	Jenis Inovasi (Layanan/P rogram/Dig ital/Kebijak an)	Unit Penggagas/Pelak sana	Latar Belakang Masalah	Tujuan Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Tahun Pelaksanaan Mulai	Status (Berjalan/Replikasi/ Pengembangan)	Dampak/Manfaat	Bukti/Dokumentasi	Keterangan
1	MODEL INOVASI EKONOMI KERAKYATAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN KOPI HULU-HILIR DENGAN KONSEP RUMAH PASEBAN	Program	PKBM Sangkanhurip Katapang	Meskipun Gunung Puntang dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas, petani masih menjual kopi dalam bentuk biji mentah dengan nilai tambah rendah akibat keterbatasan teknologi, keterampilan, dan akses pemasaran. Rantai nilai kopi dari hulu hingga hilir, termasuk di Katapang, belum terkelola secara terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga potensi ekonomi kopi belum berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model inovasi ekonomi kerakyatan yang mampu mengintegrasikan pengolahan kopi hulu-hilir melalui sistem pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.	Tujuan utama dari inovasi ini adalah untuk menghadirkan sebuah model ekonomi kerakyatan yang mampu mengintegrasikan potensi kopi dari hulu hingga hilir sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah Gunung Puntang (hulu) sebagai pusat produksi kopi dan Katapang (hilir) sebagai pusat distribusi, pengolahan, dan pemasaran. Melalui konsep Rumah Paseban, inovasi ini ditujukan untuk membangun sebuah ekosistem yang menyatukan kegiatan produksi, edukasi, inovasi, serta bisnis berbasis kopi dalam satu wadah yang terorganisir.	Rumah Paseban merupakan model inovasi ekonomi kerakyatan yang mengintegrasikan pengolahan kopi dari hulu Gunung Puntang hingga hilir Katapang melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendidikan nonformal. Inovasi ini melibatkan petani kopi dan peserta didik PKBM Sangkanhurip dalam proses pelatihan, produksi, dan pemasaran kopi berbasis kewirausahaan, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk, pendapatan masyarakat, serta menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, berkelanjutan, dan mudah direplikasi di daerah lain.	2025	Berjalan	Penerapan Model Rumah Paseban memberikan dampak nyata bagi petani kopi Gunung Puntang dan peserta didik PKBM Sangkanhurip. Petani mengalami peningkatan pendapatan dari sekitar Rp20.000 menjadi Rp60.000–Rp120.000 per hari melalui peningkatan kualitas dan pengolahan pascapanen, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi. Sementara itu, peserta didik PKBM memperoleh keterampilan pengolahan kopi, desain kemasan, dan pemasaran digital yang menumbuhkan jiwa wirausaha. Secara umum, inovasi ini memperkuat ekonomi lokal, menjaga keberlanjutan produk unggulan daerah, serta membangun kolaborasi sosial berbasis ekonomi kerakyatan.		

2	INOVASI LITERASI READIFY : MEMBANGUN BUDAYA MEMBACA DAN DISKUSI BERBASIS KOMUNITAS	Program	PKBM Sangkanhurip Katapang	Rendahnya minat baca dan budaya literasi anak serta remaja di Kampung Juntigirang, Desa Banyusari, dipengaruhi oleh kurangnya pendampingan pendidikan dari orang tua, terbatasnya ruang literasi, serta tingginya penggunaan gawai yang berdampak pada minimnya interaksi sosial. Keberadaan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang masih bersifat konvensional belum mampu menarik minat masyarakat secara optimal. Kondisi ini menuntut adanya inovasi literasi yang lebih kontekstual, menarik, dan berbasis komunitas agar budaya membaca dan diskusi dapat tumbuh secara berkelanjutan.	Inovasi READIFY bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat, khususnya anak dan remaja, melalui kegiatan membaca dan diskusi yang interaktif berbasis komunitas. Selain itu, READIFY diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gawai, memperkuat interaksi sosial, serta mengembangkan TBM menjadi ruang literasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.	READIFY merupakan inovasi pengembangan Taman Baca Masyarakat berbasis komunitas yang memadukan kegiatan membaca buku fisik, diskusi, storytelling, dan pemanfaatan platform digital pendukung literasi. Inovasi ini dilaksanakan melalui kegiatan Silent Reading, Ready For Change, dan Readify Talk yang melibatkan anak, remaja, serta masyarakat umum, dengan dukungan Karang Taruna dan lingkungan setempat sebagai penggerak utama.	2025	Berjalan	Implementasi READIFY memberikan dampak positif berupa meningkatnya minat baca, kemampuan berdiskusi, serta interaksi sosial anak dan remaja, sekaligus menurunkan intensitas penggunaan gawai secara berlebihan. Bagi masyarakat, READIFY menjadi ruang publik edukatif yang memperkuat budaya literasi dan kebersamaan, serta berpotensi menjadi model kegiatan literasi desa yang berkelanjutan dan mudah direplikasi.	 	
3	It's Blazer Ibun	Inovasi dari bahan kain sarung	PKBM AN-NUR IBUN	Inovasi fashion dari bahan kain sarung	Untuk Meningkatkan nilai jual	Inovasi fesyen berbasis kearifan lokal dengan mengolah kain sarung menjadi blazer bernilai ekonomi tinggi, diproduksi oleh UMKM binaan PKBM.	2016	Berjalan dan Pengembangan	Meningkatkan keterampilan menjahit, pendapatan UMKM, serta membuka lapangan kerja bagi perempuan.	Dokumentasi produk, pelatihan, pameran UMKM	Dikembangkan sebagai produk unggulan Local Hero Ibun
4	Pemberdayaan Perempuan (Local Hero Perempuan Ibun)	Pengembangan produk UMKM Kec. Ibun	PKBM AN-NUR IBUN	Rendahnya kemandirian ekonomi perempuan dan keterbatasan akses keterampilan serta pemasaran produk.	Meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan peran ekonomi perempuan melalui UMKM berbasis potensi lokal.	Program pendampingan perempuan melalui pelatihan keterampilan, produksi UMKM, branding, dan pemasaran produk lokal.	2018	Berjalan dan Replikasi	Terbentuknya UMKM perempuan, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan peran sosial perempuan.	Dokumentasi pelatihan, produk UMKM, sertifikat, media publikasi	Terintegrasi dengan program Local Hero Ibun